

**MENINGKATKAN
TATAKELOLA dan KINERJA
PEMERINTAH DAERAH
DALAM RANGKA
MENDORONG UMKM**



F O R U M
M A S Y A R A K A T
P E D U L I
P A Y A K U M B U H





Website:

www.YohanesAbdullah.Com

Email:

yohanes_abdullah@cnooc.co.id
yohanes.abdullah99@gmail.com

Yan Yohanes Abdullah

**Strategy & Performance Specialist
CNOOC SES Ltd.**

EDUCATION

2000 : Magister Management - Prasetya Mulia.

1987 : Industrial Engineering – Bandung Institute of Technology

EXPERIENCE IN DEVELOPING:

BSC CNOOC SES LTD.

BSC KODECO ENERGY

BSC HUSKY OIL

BSC Wiratman & Associates

BSC Multi Strada Arah Sarana Tbk

Renstra PPAK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan)

BSC Kementerian ESDM.

BSC Pemkot Payakumbuh

BSC SMP 12 BEKASI (Junior High School)

BSC SAPA - Sentra Pelayanan Agribisnis - Sukabumi (NGO)

BSC Koperasi Pekerja CNOOC

WORK EXPERIENCE

2009 – Now : Strategy Management Officer – CNOOC SES Ltd.

2007 – 2008 : Project Leader of BSC Development – CNOOC SES Ltd.

2007 – Now : Business Process & Procedure Department – CNOOC SES Ltd.

2004 – 2007 : Procurement Department – CNOOC SES Ltd, Jakarta

2002 – 2004 : Logistics Department – CNOOC SES Ltd, Jakarta

2000 – 2002 : Support Operation Department – Repsol-YPF, Kuala Lumpur

1990 – 2000 : Internal Audit Department – MAXUS SES Ltd, Jakarta

1988 – 1990 : Management Consulting Company – Indomas Mulia, Jakarta

1987 - 1988 : Industrial Engineer – PT Krakatau Steel, Cilegon.

ACHIEVEMENTS

CNOOC Success Story of BSC implementation was published by QPR in 2009.

Link: <http://www.qpr.com/Customers/customers.html>



Ventana Research, Pleasanton, CA, USA recognize success organizations demonstrate innovation and leadership in bringing together people, process, information and technology to achieve spectacular outcomes.

Ventana dedicated Overall Performance Management Leadership Award 2010 to CNOOC SES LTD on November 10, 2010.

Link:

<http://www.ventanaresearch.com/awards2010/>

Category of Ventana Award 2010

- 1. Overall Performance Management Leadership Award: CNOOS SES Ltd using QPR Software – Indonesia**
- 2. Overall Business Analytics and Performance Leadership Award: Pittsburgh Mercy Health Care using Alight Planning - United States**
- 3. Governance, Risk and Compliance (GRC) Leadership Award: Nationwide and Columbus using Information Builders - United States.**
- 4. Overall Operational Analytics and Performance Leadership Award: StoneGate Senior Care using Pentaho - United States.**
- 5. Customer Analytics and Performance Leadership Award: Station Casinos using Teradata - United States.**
- 6. Marketing Analytics and Performance Leadership Award: Station Casinos using Informatica - United States.**
- 7. Supply Chain Performance Leadership Award: Beaulieu Group using River Logic - United States.**
- 8. Overall Information Technology Leadership Award: U.S. Xpress Enterprises using Informatica - United States.**
- 9. Analytics Leadership Award: Sabre Holdings using Teradata - United States.**
- 10. Operational Intelligence (OI) Leadership Award: TXU Energy's using Vitria - United States.**
- 11. Information Management Leadership Award: HealthNow using Informatica - United States.**
- 12. Information Applications Leadership Award: US Bank using Information Builders - United States.**
- 13. Contact Center Analytics and Performance Leadership Award: Royal Bank of Canada using Teradata – Canada.**
- 14. Location Intelligence (LI) Leadership Award: Coles Mussel Farms using Pitney Bowes Business Insight – Canada.**
- 15. Financial Analytics and Performance Leadership Award: Thule using Host Analytics – Sweden**
- 16. Workforce Analytics and Performance Leadership Award: Zentiva Group using MMI Development & Human Concepts - Central & Eastern Europe**
- 17. Sales Analytics and Performance Leadership Award: Daiichi Sanyko and Synygy – Japan**
- 18. Business Intelligence (BI) Leadership Award: NASCO using Actuate – Riyadh.**

PENYUSUNAN RENSTRA PPAK BERBASIS BALANCED SCORECARD



PENGEMBANGAN BALANCED SCORECARD DI WIRATMAN & ASSOCIATES



PENGEMBANGAN BALANCED SCORECARD DI PEMKOT CILEGON





F O R U M M A S Y A R A K A T P E D U L I P A Y A K U M B U H

fMPP lahir pada 1 September 2011 di Tiaka dalam acara silaturahmi Idulfitri komunitas facebook fMPP yang terdiri atas masyarakat perantau dan masyarakat yang tinggal di Payakumbuh. fMPP adalah organisasi LSM yang sekarang sudah punya legalitas dengan akte notaris yang sudah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri, Domisili, NPWP, AD/ART, Surat Izin Terdaftar di Kesbanglinmas, dan Rekening resmi organisasi di BNI Payakumbuh.

VISI:

Menjadi LSM peduli dalam penguatan partisipasi masyarakat dibidang politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya untuk mendorong percepatan keadilan dan kemakmuran masyarakat.

MISI

1. Mensosialisasikan INDIKATOR KEMAKMURAN dan PIK (Pakta Integritas dan Kinerja) sebagai kriteria memilih Kepala Daerah yang kompeten dan jujur.
2. Memberikan sumbangsih sistem manajemen strategi dan kinerja pemda sesuai PP 6/2008 agar terwujud tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, bersih dan berwibawa.
3. Mengembangkan inisiatif strategis untuk investasi dan pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya.
4. Mengawal kinerja pemerintahan berdasarkan target indikator kemakmuran dan pakta integritas yang sudah ditandatangani oleh Kepala Daerah.
5. Menghimpun dan mensinergikan potensi masyarakat di perantauan dan di daerah untuk kemajuan kota Payakumbuh.



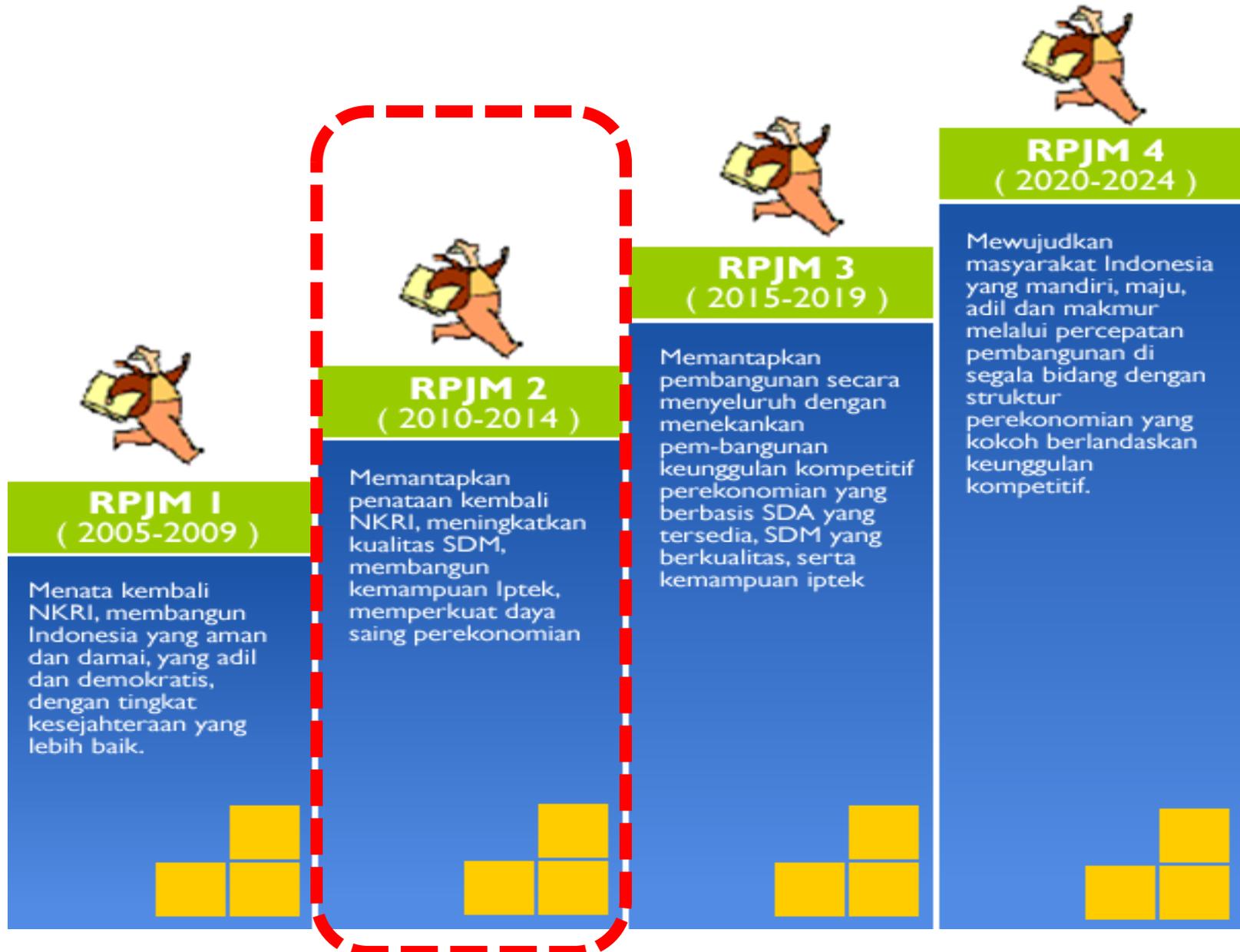
F O R U M
M A S Y A R A K A T
P E D U L I
P A Y A K U M B U H

SUSUNAN PENGURUS INTI

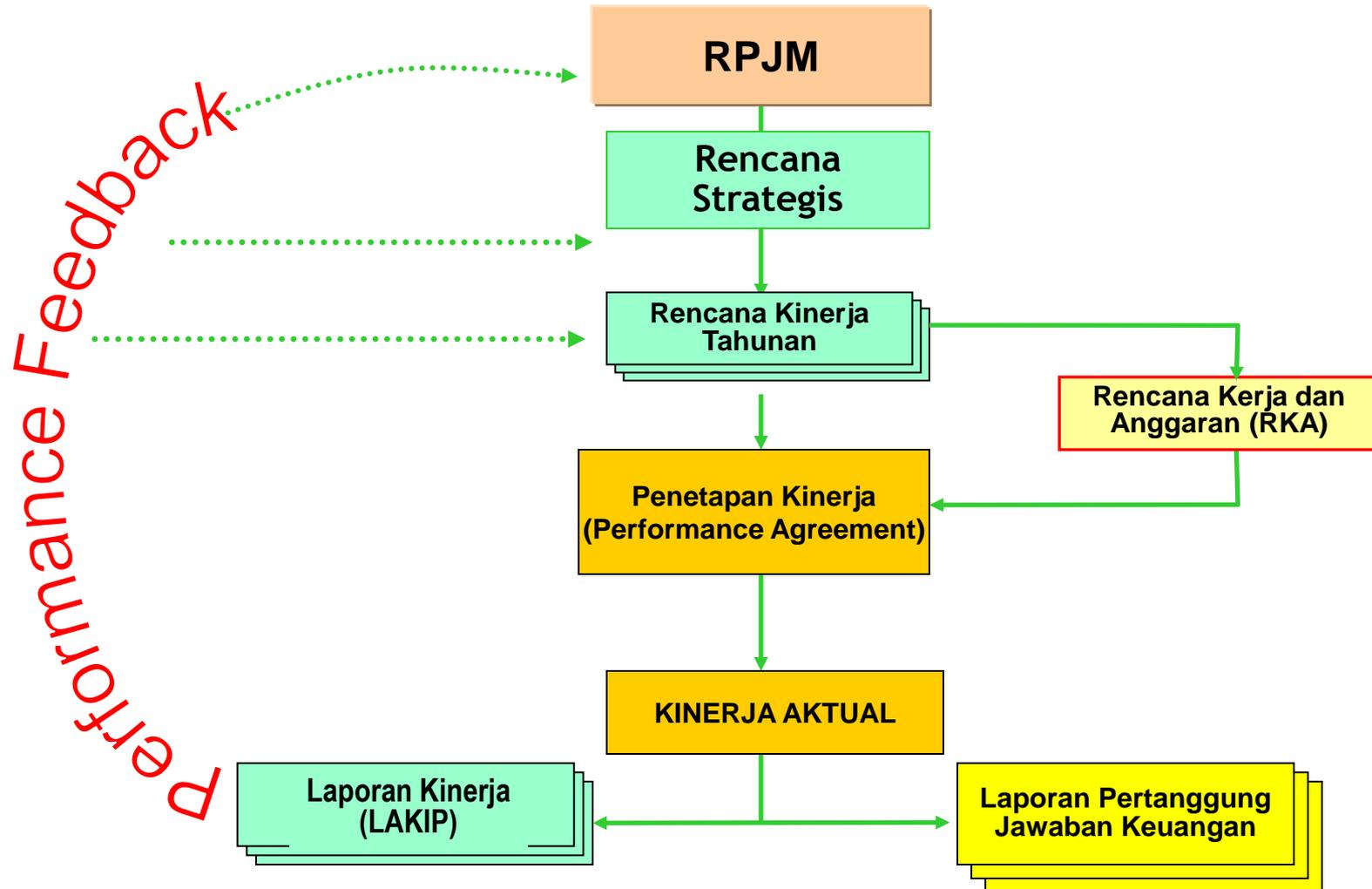
JABATAN	NAMA	DOMISILI
KETUA UMUM	Yan Yohanes Abdullah	Jakarta
KETUA 1	Sevindrajuta	Payakumbuh
KETUA 2	Teddy Piliang	Jakarta
SEKRETARIS	Syafrinot	Jakarta
SEKRETARIS 1	Asri	Payakumbuh
BENDAHARA	Titin Hastinar	Jakarta
BENDAHARA 1	Afrimars	Payakumbuh

**MANAJEMEN
STRATEGI DAN KINERJA
PEMERINTAH DAERAH**

Tahapan Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025



SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)



POKOK-POKOK PENGATURAN

- ◉ Penetapan Kinerja
- ◉ Pengukuran Kinerja
- ◉ Pelaporan Kinerja

PENETAPAN KINERJA

Suatu dokumen pernyataan kinerja /keepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi

--- Logo Lembaga ---

PENETAPAN KINERJA TAHUN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :

Pada tahun ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

.....,
Menteri/Pimpinan Lembaga/
Gubernur/Bupati/Walikota

.....

LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA TINGKAT PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Provinsi /Kabupaten /Kota : (a)
Tahun Anggaran : (b)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)

Jumlah Anggaran Tahun: Rp: (c)

Tempat,, 20...

Gubernur / Bupati/ Walikota
.....

(.....)

LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA TINGKAT SKPD

Satuan Kerja Perangkat Daerah I : (a)
Tahun Anggaran : (b)

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/ Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Jumlah Anggaran :

Program : Rp (c)

..... ,, 20 ...

Gubernur/Bupati/Walikota

Kepala Dinas

(.....)

(.....)

PENGUKURAN KINERJA

- ◉ Setiap akhir periode instansi melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja;
- ◉ Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja;
- ◉ Hasil pengukuran kinerja dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja.

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Jumlah Anggaran Tahun: Rp(c)

Jumlah Realisasi Anggaran Tahun: Rp(d)

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi yang memuat:

- ⦿ pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- ⦿ realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi;
- ⦿ penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
- ⦿ perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan

PEMANFAATAN LAKIP

- ◉ Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- ◉ Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- ◉ Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- ◉ Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan;

HASIL EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN NILAI LAKIP 2011

NILAI LAKIP		Jumlah Kab/Kota
Memuaskan	AA	Tidak ada
Sangat Baik	A	Tidak ada
Baik	B	1
Cukup Baik	CC	21
Agak Kurang	C	93
Kurang	D	65
Total Kab/Kota yang dinilai		180

SKALA NILAI LAKIP

- AA 85-100 : Memuaskan
- A 75-85 : Sangat Baik
- B 65-75 Baik, perlu sedikit perbaikan
- CC 50-65 Cukup Baik, perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar.
- C 30-50; agak Kurang, perlu banyak perbaikan termasuk perubahan mendasar
- D 0-30 artinya KURANG, PERLU BANYAK SEKALI PERBAIKAN DAN PERUBAHAN YANG SANGAT MENDASAR

1	B	KOTA SUKABUMI	46	C	KAB KUDUS	91	C	KAB TEBO	136	D	KAB JAYAPURA
2	CC	KAB BATANG HARI	47	C	KAB KULON PROGO	92	C	KAB TEMANGGUNG	137	D	KAB KARO
3	CC	KAB BENGKAYANG	48	C	KAB KUTAI BARAT	93	C	KAB TIMOR TENGAH SELATAN	138	D	KAB KEPAHANG
4	CC	KAB BIMA	49	C	KAB LAHAT	94	C	KAB TOUJO UNA-UNA	139	D	KAB KEPULAUAN ARU
5	CC	KAB BOGOR	50	C	KAB LAMPUNG SELATAN	95	C	KAB TRENGGALEK	140	D	KAB KOTA WARINGIN BARAT
6	CC	KAB BOYOLALI	51	C	KAB LAMPUNG UTARA	96	C	KOTA BANDA ACEH	141	D	KAB KUANTAN SINGIGI
7	CC	KAB GARUT	52	C	KAB LANDAK	97	C	KOTA BANJARMASIN	142	D	KAB KUNINGAN
8	CC	KAB GUNUNG KIDUL	53	C	KAB LANGKAT	98	C	KOTA BATAM	143	D	KAB KUPANG
9	CC	KAB KARIMUN	54	C	KAB LOMBOK TIMUR	99	C	KOTA BOGOR	144	D	KAB KUTAI KARTANEGARA
10	CC	KAB KERINCI	55	C	KAB MADIUN	100	C	KOTA BUKIT TINGGI	145	D	KAB LINGGA
11	CC	KAB MUSI BANYUASIN	56	C	KAB MAGELANG	101	C	KOTAIMAHI	146	D	KAB LOMBOK TENGAH
12	CC	KAB PACITAN	57	C	KAB MALINAU	102	C	KOTA DENPASR	147	D	KAB LUWU TIMUR
13	CC	KAB PANDEGLANG	58	C	KAB MALUKU TENGAH	103	C	KOTA DUMAI	148	D	KAB MANOKWARI
14	CC	KAB PANGKAJENE KEPULAUAN	59	C	KAB MALUKU TENGGARA	104	C	KOTA MADIUN	149	D	KAB MELAWI
15	CC	KAB SLEMAN	60	C	KAB MANGGARAI	105	C	KOTA MAKASSAR	150	D	KAB MUARA ENIM
16	CC	KOTA BANJAR BARU	61	C	KAB MANGGARAI TIMUR	106	C	KOTA MEDAN	151	D	KAB OGAN KOMERING ULU SELATAN
17	CC	KOTA BEKASI	62	C	KAB MERAUKE	107	C	KOTA METRO	152	D	KAB PIDIE
18	CC	KOTA BITUNG	63	C	KAB MINAHASA UTARA	108	C	KOTA PARIAMAN	153	D	KAB PRINGSEWU
19	CC	KOTA BLITAR	64	C	KAB MUNA	109	C	KOTA PROBOLINGGO	154	D	KAB SANGIHE
20	CC	KOTA CILEGON	65	C	KAB MUSI RAWAS	110	C	KOTA SINGKAWANG	155	D	KAB SELUMA
21	CC	KOTA MALANG	66	C	KAB OGAN KOMERING ILIR	111	C	KOTA TANAH BUMBU	156	D	KAB SERAM BAGIAN TIMUR
22	CC	KOTA TEGAL	67	C	KAB OGAN KOMERING ULU	112	C	KOTA TANJUNG PINANG	157	D	KAB SIAK
23	C	KAB ACEH TENGAH	68	C	KAB OGAN KOMERING ULU TIMUR	113	C	KOTA TARAKAN	158	D	KAB SIDENRENG RAPANG
24	C	KAB BADUNG	69	C	KAB PADANG PARIAMAN	114	C	KOTA TERNATE	159	D	KAB SIGI
25	C	KAB BALANGAN	70	C	KAB PARIGI MOUTONG	115	C	KOTA YOGYAKARTA	160	D	KAB SORONG
26	C	KAB BANGKA	71	C	KAB PASAMAN	116	D	KAB ACEH BARAT	161	D	KAB SUMBA TENGAH
27	C	KAB BANJAR	72	C	KAB PASAMAN BARAT	117	D	KAB ACEH BARATAYA	162	D	KAB SUMBAWA
28	C	KAB BENGKULU SELATAN	73	C	KAB PATI	118	D	KAB ACEH JAYA	163	D	KAB SUMEDANG
29	C	KAB BINTAN	74	C	KAB PESIRIS SELATAN	119	D	KAB ACEH SELATAN	164	D	KAB TANAH TORAJA
30	C	KAB BONE BOLANGO	75	C	KAB PIDIE JAYA	120	D	KAB ASAHAN	165	D	KAB TIMOR TENGAH UTARA
31	C	KAB BURU	76	C	KAB POLEWALI MANDAR	121	D	KAB BANGGAI	166	D	KAB TOLI TOLI
32	C	KAB DAIRI	77	C	KAB PURBALINGGA	122	D	KAB BANGKA TENGAH	167	D	KAB TULANG BAWANG
33	C	KAB DONGGALA	78	C	KAB ROKAN HULU	123	D	KAB BARITO SELATAN	168	D	KAB TULANG BAWANG BARAT
34	C	KAB ENDE	79	C	KAB SAMOSIR	124	D	KAB BATANG	169	D	KOTA AMBON
35	C	KAB ENREKANG	80	C	KAB SANGGAU	125	D	KAB BAU-BAU	170	D	KOTA MATARAM
36	C	KAB KAMPAR	81	C	KAB SELAYAR	126	D	KAB BEKASI	171	D	KOTA PAGAR ALAM
37	C	KAB KAPUAS	82	C	KAB SINJAI	127	D	KAB BELITUNG	172	D	KOTA PAKPAK BARAT
38	C	KAB KARANG ANYAR	83	C	KAB SITUBONDO	128	D	KAB BELITUNG TIMUR	173	D	KOTA PALU
39	C	KAB KARAWANG	84	C	KAB SRAGEN	129	D	KAB BELU	174	D	KOTA PAYAKUMBUH
40	C	KAB KATINGAN	85	C	KAB SUMENEP	130	D	KAB BERAU	175	D	KOTA PRABUMULIH
41	C	KAB KAUAR	86	C	KAB TABANAN	131	D	KAB BIREUEN	176	D	KOTA SALATIGA
42	C	KAB KEDIRI	87	C	KAB TANAH DATAR	132	D	KAB BOJO NEGORO	177	D	KOTA SIBOLGA
43	C	KAB KETAPANG	88	C	KAB TANAH LAUT	133	D	KAB BOOLANG MONGONDOW UTARA	178	D	KOTA SORONG
44	C	KAB KLATEN	89	C	KAB TANGERANG	134	D	KAB BULUKUMBA	179	D	KOTA SUNGAI PENUH
45	C	KAB KOTAWARINGIN TIMUR	90	C	KAB TANJUNG JABUNG TIMUR	135	D	KAB CIANJUR	180	D	KOTA TUAL

PENGHARGAAN UNTUK KOTA PAYAKUMBUH

1. Tahun 2012, INDONESIA MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS AWARD 2011, Penghargaan dari Wakil Presiden Republik Indonesia.
2. Tahun 2011, IGRA (INDONESIA GREEN REGIONAL AWARD) Penghargaan dari Presiden Republik Indonesia
3. Tahun 2011, PENGHARGAAN KOTA SEHAT TINGKAT SWASTISABA WISTARA Penghargaan dari Presiden Republik Indonesia
4. Tahun 2011, SATYA LENCANA KEBAKTIAN SOSIAL Penghargaan dari Presiden Republik Indonesia
5. Tahun 2011, KINERJA PU TERBAIK Penghargaan dari KEMENTERIAN PU RI
6. Tahun 2010, ADIPURA Penghargaan dari Presiden Republik Indonesia
7. Tahun 2010, KWT (KELOMPOK TANI WANITA) TERBAIK NASIONAL Penghargaan dari Presiden Republik Indonesia
8. Tahun 2010, PEMBINA KARANG TARUNA TERBAIK NASIONAL Penghargaan dari Presiden Republik Indonesia
9. Tahun 2010, IMP (INOVASI MANAJEMEN PERKOTAAN) AWARD DALAM PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL Penghargaan dari Presiden Republik Indonesia
10. Tahun 2009, SATYA LENCANA AKUTILA Penghargaan dari Presiden Republik Indonesia
11. Tahun 2009, PELOPOR SERIKAT ANTI PENGANGGURAN Penghargaan dari Presiden Republik Indonesia
12. Tahun 2009, PLAKAT WAHANA TATA NUGRAHA Penghargaan dari Presiden Republik Indonesia
13. Tahun 2009, ADIPURA Penghargaan dari Presiden Republik Indonesia
14. Tahun 2009, KOTA SEHAT TINGKAT PENGEMBANGAN Penghargaan dari Presiden Republik Indonesia
15. Tahun 2009, PENGHARGAAN PA PARPAMSI Departemen Pekerjaan Umum RI



**TAPI KENAPA RAPOR LAKIP 2011
MERAH? Nilai = D;
Peringkat 174 dari 180 yang dinilai;
Nilai paling rendah yang artinya;**

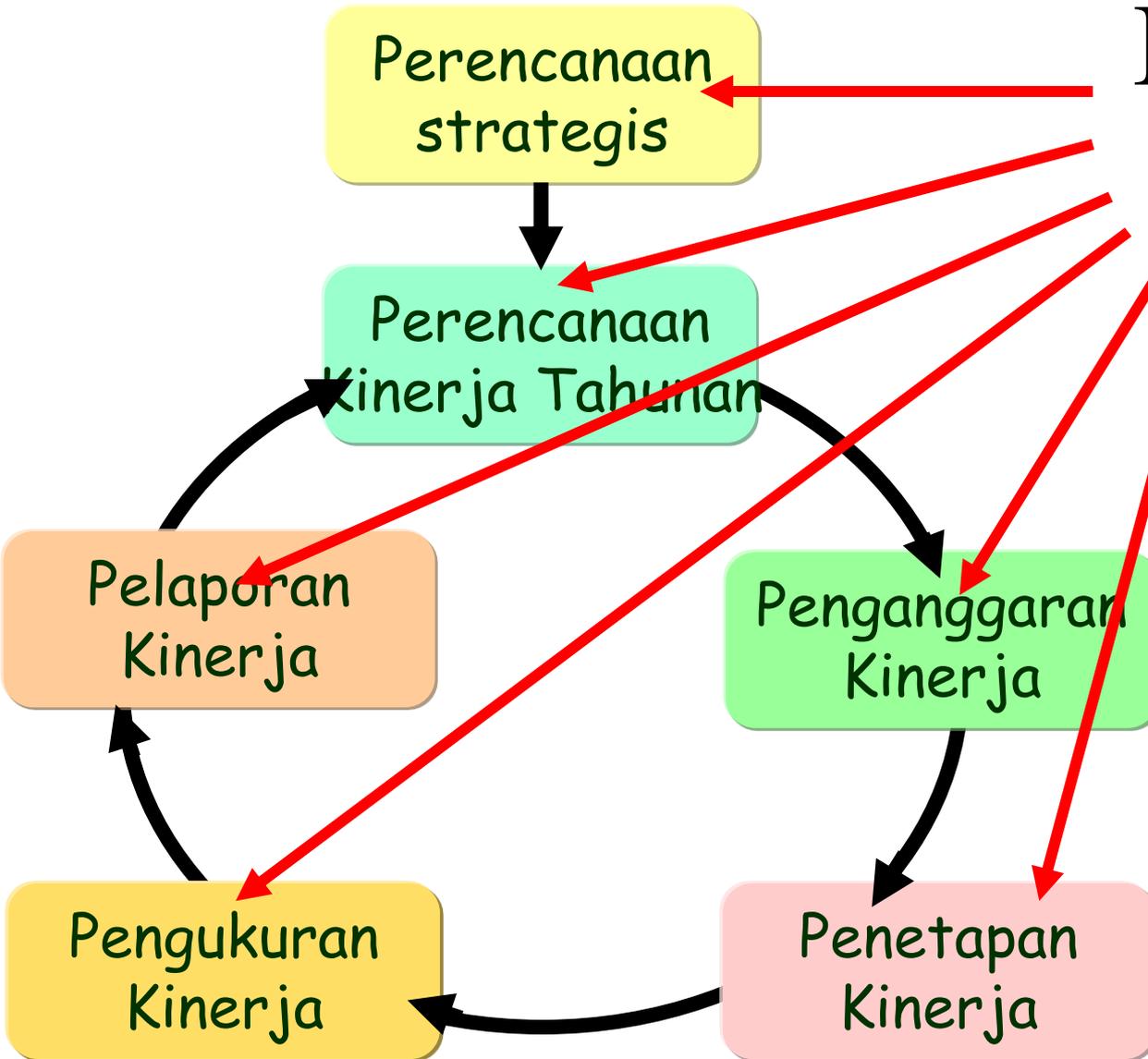
**KURANG, PERLU BANYAK SEKALI
PERBAIKAN DAN PERUBAHAN YANG
SANGAT MENDASAR**

174	D	KOTA PAYAKUMBUH
175	D	KOTA PRABUMULIH
176	D	KOTA SALATIGA
177	D	KOTA SIBOLGA
178	D	KOTA SORONG
179	D	KOTA SUNGAI PENUH
180	D	KOTA TUAL

INDIKATOR KINERJA UTAMA

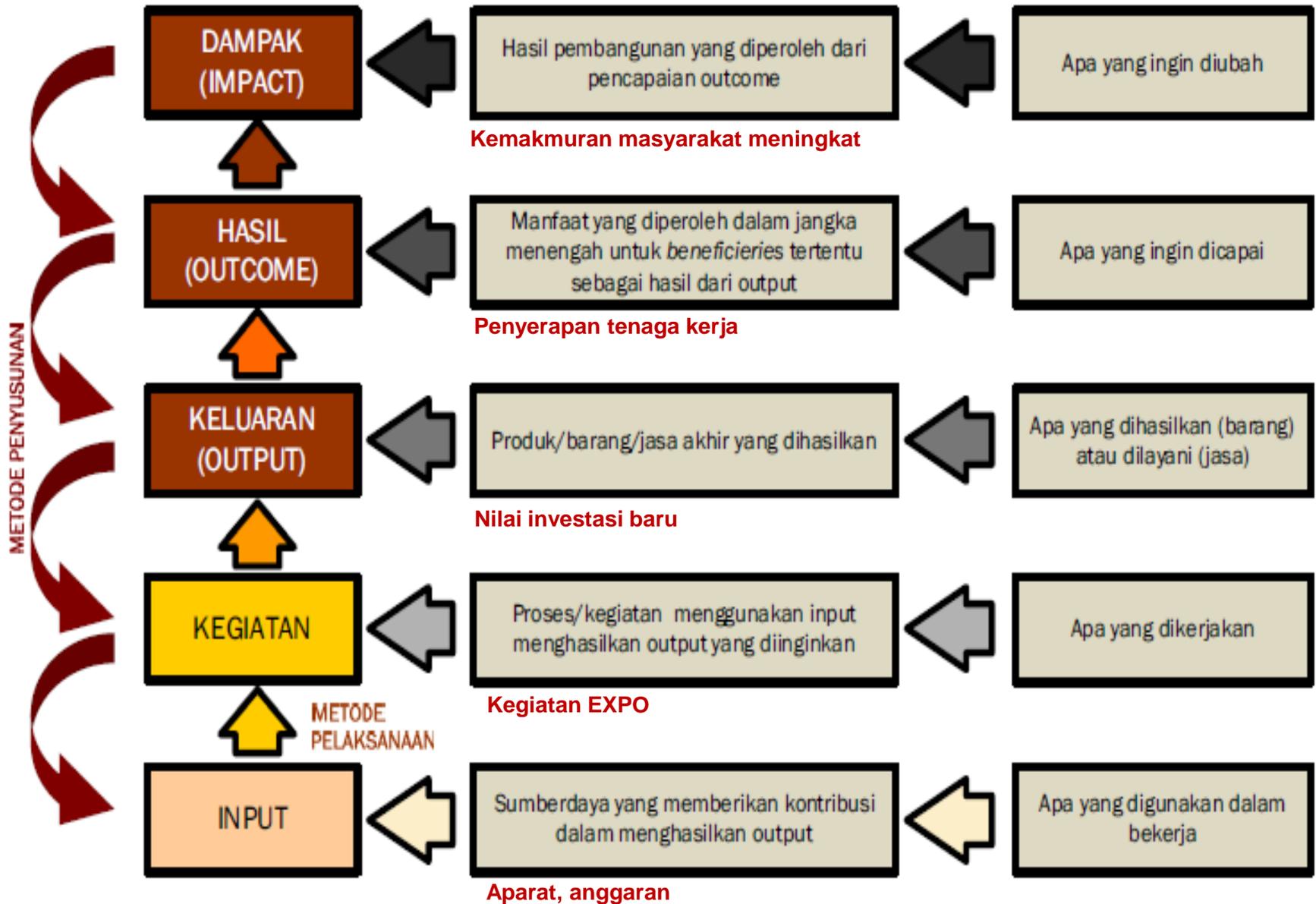
- **Dasar Hukum:**
Permen. PAN No. PER/09/M.PAN/05/2009 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah
- IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi
- IKU dapat berupa outcome atau output

Indikator Kinerja



Indikator Kinerja merupakan *unsur penting* Akuntabilitas Kinerja

LANGKAH PERUMUSAN INDIKATOR KINERJA



RATING DAN INDIKATOR KEMAKMURAN



THE 2011 LEGATUM PROSPERITY INDEX™

		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Norway	3	8	12	4	4	2	3	1	5
70	Indonesia	44	80	78	66	83	61	83	51	68

INDICATOR OF PROSPERITY

1. Economy
2. Entrepreneurship & Opportunity
3. Governance
4. Education
5. Health
6. Safety & Security
7. Personal Freedom
8. Social Capital

1	Norway	23	Spain	45	Thailand	67	Botswana	89	Egypt
2	Denmark	24	South Korea	46	Kazakhstan	68	Peru	90	Mali
3	Australia	25	Portugal	47	Trinidad and Tobago	69	South Africa	91	India
4	New Zealand	26	Czech Republic	48	Bulgaria	70	Indonesia	92	Senegal
5	Sweden	27	United Arab Emirates	49	Saudi Arabia	71	Morocco	93	Nepal
6	Canada	28	Poland	50	Belarus	72	Dominican Republic	94	Cambodia
7	Finland	29	Uruguay	51	Latvia	73	Venezuela	95	Bangladesh
8	Switzerland	30	Italy	52	China	74	Ukraine	96	Tanzania
9	Netherlands	31	Chile	53	Mexico	75	Turkey	97	Iran
10	United States	32	Slovakia	54	Tunisia	76	Macedonia	98	Rwanda
11	Ireland	33	Estonia	55	Jamaica	77	El Salvador	99	Cameroon
12	Iceland	34	Costa Rica	56	Belize	78	Ghana	100	Uganda
13	United Kingdom	35	Kuwait	57	Paraguay	79	Moldova	101	Zambia
14	Austria	36	Hungary	58	Romania	80	Namibia	102	Kenya
15	Germany	37	Panama	59	Russia	81	Syria	103	Mozambique
16	Singapore	38	Israel	60	Mongolia	82	Lebanon	104	Nigeria
17	Belgium	39	Argentina	61	Colombia	83	Ecuador	105	Sudan
18	France	40	Greece	62	Vietnam	84	Guatemala	106	Yemen
19	Hong Kong	41	Croatia	63	Sri Lanka	85	Bolivia	107	Pakistan
20	Taiwan	42	Brazil	64	Uzbekistan	86	Nicaragua	108	Ethiopia
21	Japan	43	Malaysia	65	Jordan	87	Honduras	109	Zimbabwe
22	Slovenia	44	Lithuania	66	Philippines	88	Algeria	110	Central African Republic

Human Development Report 2011 - Sustainability and Equity: A Better Future for All

Table 1 - Human Development Index and its components

HDI rank		Human Development Index (HDI) Value 2011	Life expectancy at birth (years) 2011	Mean years of schooling (years) 2011 ^a	Expected years of schooling (years) 2011 ^a	Gross National Income (GNI) per capita (Constant 2005 PPP\$) 2011
VERY HIGH HUMAN DEVELOPMENT						
1	Norway	0.943	81.1	12.6	17.3	47,557
2	Australia	0.929	81.9	12.0	18.0	34,431
46	Croatia	0.796	76.6	9.8	13.9 ^b	15,729
47	Barbados	0.793	76.8	9.3	13.4 ^h	17,966
HIGH HUMAN DEVELOPMENT						
48	Uruguay	0.783	77.0	8.5	15.5 ^b	13,242
49	Palau	0.782	71.8	12.1	14.7 ⁱ	9,744
50	Romania	0.781	74.0	10.4	14.9	11,046
51	Cuba	0.776	79.1	9.9	17.5	5,416
92	Turkey	0.699	74.0	6.5	11.8	12,246
93	Belize	0.699	76.1	8.0	12.4 ^b	5,812
94	Tunisia	0.698	74.5	6.5	14.5	7,281
MEDIUM HUMAN DEVELOPMENT						
95	Jordan	0.698	73.4	8.6	13.1	5,300
96	Algeria	0.698	73.1	7.0	13.6	7,658
123	South Africa	0.619	52.8	8.5	13.1 ^b	9,469
124	Indonesia	0.617	69.4	5.8	13.2	3,716
125	Vanuatu	0.617	71.0	6.7	10.4	3,950
141	Bhutan	0.522	67.2	2.3	11.0 ^r	5,293
LOW HUMAN DEVELOPMENT						
142	Solomon Islands	0.510	67.9	4.5	9.1 ⁱ	1,782
143	Kenya	0.509	57.1	7.0	11.0	1,492
186	Niger	0.295	54.7	1.4	4.9	641
187	Congo (Democratic Republic of the)	0.286	48.4	3.5	8.2	280

RANK	Country	USD	Year
1	Luxembourg	89,992	2011
2	Qatar	88,919	2011
3	Macau	77,607	2011
4	Norway	61,882	2011
5	Singapore	61,103	2011
6	Kuwait	54,654	2011
7	Brunei	50,506	2010
8	Hong Kong	49,990	2011
9	Switzerland	49,151	2011
10	United States	48,442	2011
26	Japan	34,294	2011
35	Israel	27,835	2011
38	Greece	26,948	2011
49	Russia	21,248	2011
61	Malaysia	15,589	2011
81	Iran	11,479	2009
96	Thailand	8,703	2011
119	Mongolia	4,764	2011
120	Indonesia	4,668	2011
138	Pakistan	2,763	2011
139	Papua New Guinea	2,695	2011
161	East Timor	1,588	2011
179	Sierra Leone	877	2011
180	Central African Republic	816	2011
181	Niger	732	2011
182	Burundi	608	2011
183	Eritrea	589	2011
184	Liberia	577	2011
185	Congo, Dem. Rep.	375	2011
	Total	2,801,831	
	Average	15,145	
	Indonesia	31%	Avg

PDB per Kapita Indonesia di tingkat internasional

Sumber: Bank Dunia

- 4,668 \$ per orang per tahun
- Hanya 31% dari RATA-RATA PDB dunia (sangat jauh di bawah rata-2 kelas).
- menempati Peringkat 120 dari 185 negara.

PDRB PER KAPITA - BPS 2008

Rank	Provinsi	PDRB Rp/capita/year	PDRB Rp/capita/month
	Indonesia	21,678,000	1,806,500
1	Kalimantan Timur	101,858,000	8,488,167
2	DKI Jakarta	74,065,000	6,172,083
3	Riau	53,264,000	4,438,667
4	Kepulauan Riau	40,746,000	3,395,500
5	Papua	26,615,000	2,217,917
6	Kepulauan Bangka Belitung	19,350,000	1,612,500
7	Sumatra Selatan	18,725,000	1,560,417
8	Nanggroe Aceh Darussalam	17,124,000	1,427,000
9	Papua Barat	17,084,000	1,423,667
10	Jawa Timur	16,757,000	1,396,417
11	Sumatra Utara	16,403,000	1,366,917
12	Kalimantan Tengah	15,725,000	1,310,417
13	Sumatra Barat	14,955,000	1,246,250
14	Jawa Barat	14,723,000	1,226,917
15	Jambi	14,226,000	1,185,500
16	Bali	14,199,000	1,183,250
17	Kalimantan Selatan	13,206,000	1,100,500
18	Banten	12,757,000	1,063,083
19	Sulawesi Utara	12,610,000	1,050,833
20	Sulawesi Tengah	11,540,000	961,667
21	Kalimantan Barat	11,394,000	949,500
22	Jawa Tengah	11,184,000	932,000
23	Daerah Istimewa Yogyakarta	10,985,000	915,417
24	Sulawesi Selatan	10,909,000	909,083
25	Sulawesi Tenggara	10,686,000	890,500
26	Lampung	10,078,000	839,833
27	Bengkulu	8,799,000	733,250
28	Nusa Tenggara Barat	8,080,000	673,333
29	Sulawesi Barat	7,535,000	627,917
30	Gorontalo	6,068,000	505,667
31	Nusa Tenggara Timur	4,769,000	397,417
32	Maluku	4,747,000	395,583
33	Maluku Utara	4,019,000	334,917

PDRB per kapita Sumbar ditingkat nasional.

Sumber: BPS

- **PDRB Per Kapita Provinsi Sumatra Barat = Rp 14,955,000 per orang per tahun atau Rp 1,246,250 per orang per bulan.**
- **Hanya 69% dari dari RATA-RATA PDRB seluruh provinsi (jauh di bawah rata-2 kelas)**
- **menempati Peringkat 13 dari 33 provinsi.**

PDRB perkapita merupakan PDRB (atas dasar harga berlaku) dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Dengan menggunakan data penduduk hasil Sensus Penduduk 2010, PDRB per kapita tahun 2010 diperkirakan sebesar Rp. 18,00 juta. Dengan laju peningkatan sebesar 12 persen dibandingkan dengan PDRB per kapita tahun 2009 yang sebesar Rp. 16,02 juta.

Tabel
Table XI.7

**Pendapatan Regional dan Angka-angka Perkapita
Kota Payakumbuh Atas Dasar Harga Berlaku
2007-2009 (Jutaan Rupiah)
*The Regional Income and per Capita Income of Payakumbuh
Municipality at Current Price 2007-2009 (Million Rupiahs)***

PERINCIAN/ Eksplanations	2007	2008 *)	2009 **)
PDRB Perkapita (Rupiah) <i>Per capita Gross Regional Domestic Product (Rupiahs)</i>	12 326 328,98	14 161 442,54	15 489 073,91

PDRB per kapita Payakumbuh di tingkat Provinsi

Sumber: BPS

- PDRB Per Kapita Provinsi Sumatra Barat = Rp 16.02 juta per orang per tahun atau Rp 1,3 juta per orang per bulan.
- Hanya 97% dari dari RATA-RATA PDRB di tingkat provinsi (masih di bawah rata-2 kelas kabupaten dan kota)

TINGKAT KEMISKINAN

(Garis Kemiskinan resmi BPS = Rp 230,000 per orang per bulan)

PENDUDUK MISKIN 2010

TINGKAT NASIONAL : 13.33% atau 31 juta jiwa

PROPINSI SUMBAR : 9.50% atau 430,000 jiwa

KOTA PAYAKUMBUH : 6,63% atau 7,750 jiwa

Artinya:

Payakumbuh > Sumbar > Nasional

KEMISKINAN PROVINSI-PROVINSI DI INDONESIA - 2010

	Propinsi	Penduduk Miskin	%Penduduk miskin		Propinsi	Penduduk Miskin	%Penduduk miskin
1	Nangroe Aceh Darussalan	861,900	20.98	18	Nusa Tenggara Barat	1,009,400	21.55
2	Sumatera Utara	1,490,900	11.31	19	Nusa Tenggara Timur	1,014,100	23.03
3	Sumatera Barat	430,000	9.50	20	Kalimantan Barat	428,800	9.02
4	Riau	500,300	8.65	21	Kalimantan Tengah	164,200	6.77
5	Jambi	241,600	8.34	22	Kalimantan selatan	182,000	5.21
6	Sumatera Selatan	1,125,700	15.47	23	Kalimantan Timur	243,000	7.66
7	Bengkulu	324,900	18.30	24	Sulawesi Utara	206,700	9.10
8	Lampung	1,479,900	18.94	25	Sulawesi Tengah	475,000	18.07
9	Bangka Belitung	67,800	6.51	26	Sulawesi Selatan	913,400	11.60
10	Kepulauan Riau	129,700	8.05	27	Sulawesi Tenggara	400,700	17.05
11	DKI Jakarta	312,200	3.48	28	Gorontalo	209,900	23.19
12	Jawa Barat	4,773,700	11.27	29	Sulawesi Barat	141,300	13.58
13	Jawa Tengah	5,369,200	16.56	30	Maluku	378,600	27.74
14	DI Yogyakarta	577,300	16.83	31	Maluku Utara	91,100	9.42
15	Jawa Timur	5,529,300	15.26	32	Papua Barat	256,300	34.88
16	Banten	758,200	7.16	33	Papua	761,600	36.80
17	Bali	174,900	4.88		Indonesia	31,023,400	13.33

Source Data: BPS

KEMISKINAN PAYAKUMBUH ditingkat SUMBAR



Sekdako H. Irwandi, SH,

**Payakumbuh, Luncurkan Agropolitan dan Bank Sampah
Berita Kota - Payakumbuh
Saturday, 05 February 2011 07:28**

Payakumbuh, Luncurkan Agropolitan dan Bank Sampah
Berita Kota - Payakumbuh

Saturday, 05 February 2011 07:28

Payakumbuh, Sitinjaunews - Program agropolitan dan bank sampah, menjadi mimpi Payakumbuh di tahun 2011.

“Bukan sekedar impian atau slogan kosong. Tapi, kebijakan Walikota Payakumbuh H. Josrizal Zain ini, mesti kami wujudkan. Seluruh pimpinan SKPD diminta terjun langsung menyukseskan program strategis ini,” ucap Sekdako H. Irwandi, SH, di Balaikota di Bukik Sibaluk Payakumbuh, Jum’at (4/2/2011).

Agropolitan dan bank sampah, inovasi yang diapungkan Walikota Josrizal Zain di awal tahun ini. Dua program tersebut, diyakini, mampu meningkatkan pemberdayaan dan pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat. Konsep agropolitan, membangun kota di kawasan pertanian, sudah dimulai dengan membentuk LKMA (Lembaga keuangan mikro agrobisnis) dan sub. terminal agrobisnis (STA) di setiap kecamatan.

.....
.....

.....
.....

Dampak kegiatan pemberdayaan yang dilakukan pemko, lewat kebijakan lokal, melalui program sanitasi, ekonomi kerakyatan, peternakan sapi seduaan, intensifikasi pertanian, mencetak tenaga kerja yang siap pakai, dan membudayakan pola hidup bersih dan sehat, mengalami perubahan yang cukup signifikan, terhadap jumlah KK miskin di Payakumbuh.

Angka 5.217 KK miskin yang tercatat pada tahun 2005, berkurang menjadi 3.671 KK pada tahun 2008. Tahun 2009, KK miskin berjumlah 3.142. **Bahkan diakhir tahun 2010 ini angka miskin yang ditargetkan akan mencapai 2.638 KK telah menjadi 1.828 KK.** Hanya sekitar **6,63%** atau **7750 orang** dari jumlah penduduk Payakumbuh. Jika dihitung dari tahun 2005, angka kemiskinan di kota Payakumbuh telah berkurang sebesar 65%.

.....
.....

TINGKAT PENGANGGURAN

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

TINGKAT NASIONAL : 7.40% atau 8.5 juta jiwa

PROPINSI SUMBAR : 7.57% atau 172,000 jiwa

KOTA PAYAKUMBUH : 6,50% atau 3,696 jiwa

Payakumbuh > Nasional > Sumbar

Tabel 5.4

Penduduk yang Termasuk Angkatan Kerja, Bekerja, Pengangguran Terbuka dan Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi
Februari 2009–Februari 2010

Provinsi	Angkatan Kerja (juta)		Bekerja (juta)		Pengangguran Terbuka (ribu)		Tingkat Pengangguran (%)	
	Feb 2009	Feb 2010	Feb 2009	Feb 2010	Feb 2009	Feb 2010	Feb 2009	Feb 2010
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	1,86	1,93	1,69	1,77	173,62	166,28	9,31	8,60
Sumatera Utara	6,32	6,40	5,80	5,90	521,64	512,83	8,25	8,01
Sumatera Barat	2,18	2,27	2,01	2,10	172,25	172,08	7,90	7,57
Riau	2,31	2,35	2,10	2,18	206,47	169,16	8,96	7,21
Jambi	1,34	1,35	1,27	1,30	69,86	60,06	5,20	4,45
Sumatera Selatan	3,49	3,62	3,20	3,38	292,23	237,12	8,38	6,55
Bengkulu	0,87	0,88	0,82	0,84	46,05	35,68	5,31	4,06
Lampung	3,74	3,75	3,51	3,53	230,94	223,49	6,18	5,95
Bangka Belitung	0,56	0,55	0,53	0,53	26,82	23,32	4,82	4,24
Kepulauan Riau	0,67	0,70	0,62	0,65	52,24	50,73	7,81	7,21
DKI Jakarta	4,76	4,75	4,19	4,21	570,56	537,47	11,99	11,32
Jawa Barat	19,05	19,21	16,79	17,18	2 257,66	2 031,55	11,85	10,57
Jawa Tengah	16,61	17,13	15,40	15,96	1 208,67	1 174,90	7,28	6,86
D. I. Yogyakarta	2,05	2,07	1,93	1,94	122,97	124,38	6,00	6,02
Jawa Timur	20,31	20,62	19,12	19,61	1 193,55	1 011,95	5,87	4,91
Banten	4,45	4,44	3,79	3,81	663,90	627,83	14,90	14,13
Bali	2,06	2,12	2,00	2,04	60,41	75,64	2,93	3,57

TINGKAT NASIONAL

Bali	2,06	2,12	2,00	2,04	60,41	75,64	2,93	3,57
Nusa Tenggara Barat	2,04	2,13	1,92	2,00	124,94	122,84	6,12	5,78
Nusa Tenggara Timur	2,34	2,39	2,28	2,30	65,16	83,32	2,78	3,49
Kalimantan Barat	2,26	2,28	2,13	2,15	127,19	125,19	5,63	5,50
Kalimantan Tengah	1,08	1,10	1,03	1,06	49,01	42,73	4,53	3,88
Kalimantan Selatan	1,76	1,85	1,64	1,74	118,41	108,75	6,75	5,89
Kalimantan Timur	1,49	1,54	1,32	1,37	165,09	160,48	11,09	10,45
Sulawesi Utara	1,07	1,07	0,96	0,96	114,53	112,61	10,63	10,48
Sulawesi Tengah	1,23	1,29	1,17	1,22	63,15	62,96	5,11	4,89
Sulawesi Selatan	3,40	3,56	3,10	3,28	296,56	284,37	8,74	7,99
Sulawesi Tenggara	0,98	1,03	0,93	0,98	53,07	49,30	5,38	4,77
Gorontalo	0,46	0,48	0,44	0,46	23,43	24,48	5,06	5,05
Sulawesi Barat	0,52	0,55	0,49	0,52	25,39	22,41	4,92	4,10
Maluku	0,59	0,62	0,53	0,57	61,19	57,04	10,38	9,13
Maluku Utara	0,44	0,42	0,41	0,40	29,12	25,45	6,61	6,03
Papua Barat	0,36	0,37	0,33	0,34	27,86	28,56	7,73	7,77
Papua	1,09	1,17	1,04	1,12	45,02	47,57	4,13	4,08
Indonesia	113,74	116,00	104,49	107,41	9 258,96	8 592,49	8,14	7,41

TABEL 10 : PENDUDUK USIA 15 TAHUN KEATAS YANG BEKERJA, PERSENTASE PENGANGGURAN DAN PARTISIPASI ANGKATAN KERJA MENURUT KABUPATEN/KOTA AGUSTUS 2010 PROPINSI SUMATERA BARAT

Kabupaten/Kota	Angkatan Kerja		Bekerja		Pengangguran		TPT	
	Agust 2009	Agust 2010	Agust 2009	Agust 2010	Agust 2009	Agust 2010	Agust 2009	Agust 2010
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
01. Kep. Mentawai	33.445	37.982	31.574	36.453	1.871	1.529	5,59	4,03
02. Pesisir Selatan	188.906	172.789	170.536	158.806	18.370	13.983	9,72	8,09
03. Solok	167.579	166.775	160.023	161.700	7.556	5.075	4,51	3,04
04. Sawahlunto/Sjj.	95.932	86.660	91.122	83.023	4.810	3.637	5,01	4,20
05. Tanah Datar	161.515	158.643	153.903	153.948	7.612	4.695	4,71	2,96
06. Padang Pariaman	172.440	167.301	161.164	159.162	11.276	8.139	6,54	4,86
07. Agam	206.201	210.386	198.408	198.682	7.793	11.704	3,78	5,56
08. Lima Puluh Kota	172.145	176.115	161.663	168.563	10.482	7.552	6,09	4,29
09. Pasaman	111.903	113.395	105.165	105.560	6.738	7.835	6,02	6,91
10. Solok Selatan	60.249	68.093	54.887	63.111	5.362	4.982	8,90	7,32
11. Dharmas raya	79.961	90.963	75.844	87.419	4.117	3.544	5,15	3,90
12. Pasaman Barat	148.975	167.519	139.868	158.617	9.107	8.902	6,11	5,31
71. Padang	353.238	357.206	297.203	304.790	56.035	52.416	15,86	14,67
72. Solok	28.012	25.789	24.844	23.312	3.168	2.477	11,31	9,60
73. Sawahlunto	23.782	29.685	19.960	25.414	3.822	4.271	16,07	14,39
74. Padang Panjang	25.944	23.103	23.091	20.970	2.853	2.133	11,00	9,23
75. Bukittinggi	55.231	50.404	50.363	46.800	4.868	3.604	8,81	7,15
76. Payakumbuh	53.975	56.888	49.544	53.192	4.431	3.696	8,21	6,50
77. Pariaman	32.569	34.344	29.760	31.932	2.809	2.412	8,62	7,02
Sumatera Barat	2.172.002	2.194.040	1.998.922	2.041.454	173.080	152.586	7,97	6,95

Catatan :1.TPT adalah rasio jumlah penganggur terbuka terhadap jumlah angkatan kerja.

**TINGKAT
PENGANGGURAN**

TINGKAT PENDIDIKAN

RATA-RATA LAMA SEKOLAH

TINGKAT NASIONAL : 7.50 TAHUN

PROPINSI SUMBAR : 8.30 TAHUN

KOTA PAYAKUMBUH : 9.31 TAHUN

Payakumbuh > Sumbar > Nasional

RATA-RATA LAMA SEKOLAH

Pada tabel dibawah ini menunjukkan rata-rata lama sekolah menurut jenis kelamin dan daerah tempat tinggal, secara nasional rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas pada tahun 2006 mencapai 7.4 tahun, sedangkan tahun 2008 mencapai 7.5 tahun. Hal ini berarti bahwa rata-rata penduduk Indonesia baru mampu menempuh pendidikan sampai dengan kelas I SMP atau putus sekolah dikelas II SMP. Dilihat dari jenis kelamin, rata-rata lama sekolah laki-laki (8 tahun) lebih besar dari perempuan (7 tahun), sedangkan menurut daerah tempat tinggal, didaerah perkotaan (9 tahun) lebih lama dibandingkan daerah perdesaan (6.2 tahun).

Rata-rata Lama Sekolah (tahun) menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, Tahun 2006-2008

Jenis Kelamin	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan + Perdesaan		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Laki-laki	9.5	9.5	9.4	6.7	6.7	6.6	7.9	8.0	8.0
Perempuan	8.5	8.6	8.5	5.7	5.7	5.7	7.0	7.0	7.1
Laki-laki + Perempuan	9.0	9.0	8.9	6.2	6.2	6.2	7.4	7.5	7.5

Sumber: BPS, Indikator Kesra 2007 & 2008

Rata-Rata Lama Sekolah 34 Provinsi di Indonesia

RANK	PROVINSI	2008
1	DKI Jakarta	10.20
2	D.I. Yogyakarta	8.70
3	Kalimantan Timur	8.70
4	Sulawesi Utara	8.70
5	Sumatera Utara	8.50
6	Riau	8.50
7	Maluku	8.50
8	N.A. Darussalam	8.30
9	Sumatera Barat	8.30
10	Kepulauan Riau	8.10
11	Maluku Utara	7.90
12	Bengkulu	7.80
13	Bali	7.80
14	Sulawesi Tengah	7.80
15	Banten	7.70
16	Kalimantan Tengah	7.70
17	Sulawesi Tenggara	7.70

RANK	PROVINSI	2008
18	Papua Barat	7.70
19	Jambi	7.60
20	Sumatera Selatan	7.60
21	Jawa Barat	7.50
22	Indonesia	7.50
23	Kep. Bangka Belitung	7.40
24	Kalimantan Selatan	7.40
25	Sulawesi Selatan	7.30
26	Lampung	7.20
27	Jawa Timur	7.00
28	Sulawesi Barat	7.00
29	Jawa Tengah	6.90
30	Gorontalo	6.90
31	Kalimantan Barat	6.60
32	Nusa Tenggara	6.50
33	Nusa Tenggara Timur	6.40
34	Papua	6.30

Sumber: BPS diolah dari Susenas 2008

Rata-Rata Lama Sekolah Kota/Kabupaten di SUMBAR

RANK	Kota/ Kabupaten	2008
1	Padang	10.81
2	Bukitinggi	10.46
3	Pdg Panjang	10.37
4	Solok	9.89
5	Pariaman	9.44
6	Payakumbuh	9.31
7	Sawahlunto	9.15
8	Agam	8.20
9	Padang Pariaman	8.18
10	Lima Puluh Kota	7.78
11	Solok Selatan	7.65
12	Pesisir Selatan	7.64
13	Pasaman	7.55
14	Dharmasraya	7.55
15	Tanah Datar	7.51
16	Pasaman Barat	7.50
17	Solok	7.38
18	Sijunjung	7.35
19	Kep. Mentawai	6.92

Badan Pemberdayaan Perempuan Prov Sumbar

TINGKAT KESEHATAN

ANGKA HARAPAN HIDUP

DUNIA TERTINGGI JEPANG = 82.6 TAHUN
 TERENDAH Swaziland = 39.6 TAHUN

INDONESIA = 70.7 TAHUN; PERINGKAT 110 dari 195 NEGARA

SUMBAR: TERTINGGI : SAWAHLUNTO = 71.28 TAHUN
 TERENDAH : SOLOK SELATAN = 64.41 TAHUN
 RATA-2 : 69.06 TAHUN

KOTA PAYAKUMBUH : 70.37 TAHUN

Nasional > Payakumbuh > Sumbar

ANGKA HARAPAN HIDUP

Definisi

Angka Harapan Hidup pada suatu umur x adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x , pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya.

Angka Harapan Hidup Saat Lahir adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu.

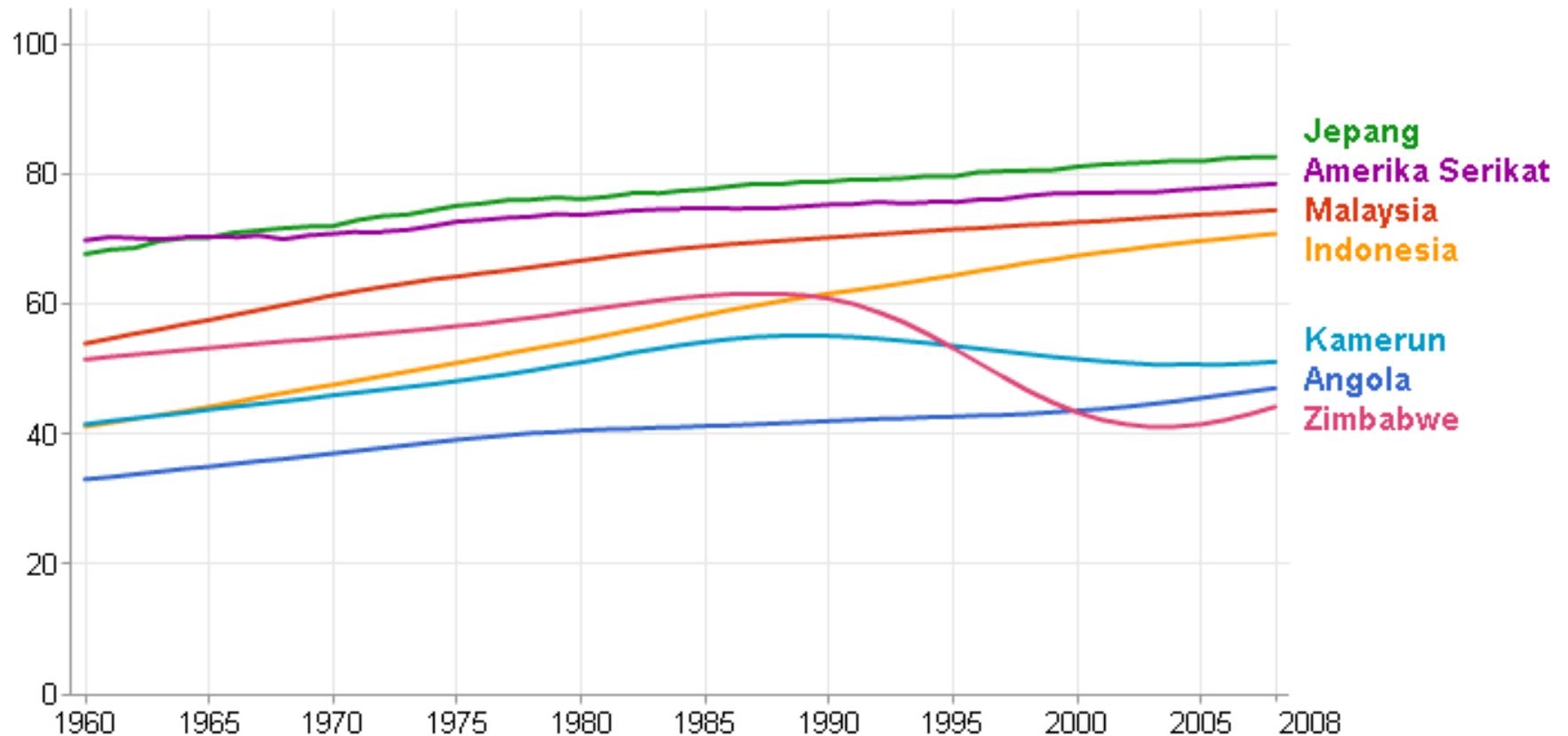
Kegunaan

Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gisi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Cara Menghitung Idealnya Angka Harapan Hidup dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (*Age Specific Death Rate/ASDR*) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat Tabel Kematian. Tetapi karena sistem registrasi penduduk di Indonesia belum berjalan dengan baik maka untuk menghitung Angka Harapan Hidup digunakan cara tidak langsung dengan program Mortpak Lite.

Harapan hidup

Angka harapan hidup bayi yang baru lahir dengan pola angka kematian saat ini tetap sama. [Info lengkap »](#)



Sumber data: [Bank Dunia, Indikator Pembangunan Dunia](#) - Last updated 2 Apr 2011

LIFE EXPECTANCY AT BIRTH

1	Japan	82.6	41	Kuwait	77.6	81	Lithuania	73.0	155	Madagascar	59.4
2	Hongkong	82.2	42	Barbados	77.3	82	People's China	73.0	156	Gambia	59.4
3	Iceland	81.8	43	Brunei	77.1	83	Nicaragua	72.9	157	Sudan	58.6
4	Switzerland	81.7	44	Czech	76.5	84	Colombia	72.9	158	Togo	58.4
5	Australia	81.2	45	Réunion	76.4	85	Mauritius	72.8	159	Eritrea	58.0
6	Spain	80.9	46	Albania	76.4	86	Saudi Arabia	72.8	160	Papua New Guinea	57.2
7	Sweden	80.9	47	Uruguay	76.4	87	Latvia	72.7	161	Niger	56.9
8	Israel	80.7	48	Mexico	76.2	88	Jamaica	72.6	162	Benin	56.7
9	Macau	80.7	49	Belize	76.1	89	Jordan	72.5	163	Gabon	56.7
10	France	80.7	50	New Caledonia	76.1	90	Romania	72.5	164	Guinea	56.0
11	Canada	80.7	51	French Guiana	75.9	91	Sri Lanka	72.4	165	Republic Congo	55.3
12	Italy	80.5	52	Croatia	75.7	92	Brazil	72.4	166	Djibouti	54.8
13	New Zealand	80.2	53	Oman	75.6	93	Algeria	72.3	167	Mali	54.5
14	Norway	80.2	54	Bahrain	75.6	94	Dominican	72.2	168	Kenya	54.1
15	Singapore	80.0	55	Qatar	75.6	95	Lebanon	72.0	169	Ethiopia	52.9
16	Austria	79.8	56	Poland	75.6	96	Armenia	72.0	170	Namibia	52.9
17	Netherlands	79.8	57	Panama	75.5	97	El Salvador	71.9	171	Tanzania	52.5
18	Martinique	79.5	58	Guam	75.5	98	Turkey	71.8	172	Burkina Faso	52.3
19	Greece	79.5	59	Argentina	75.3	99	Paraguay	71.8	173	Equatorial Guinea	51.6
20	Belgium	79.4	60	Netherlands Antiles	75.1	100	Philippines	71.7	174	Uganda	51.5
21	Malta	79.4	61	Ecuador	75.0	101	Cape Verde	71.7	175	Botswana	50.7
22	United Kingdom	79.4	62	Bosnia	74.9	102	Grenadines	71.6	176	Chad	50.6
23	Germany	79.4	63	Slovakia	74.7	103	Samoa	71.5	177	Cameroon	50.4
24	U.S.Virgin Island	79.4	64	Montenegro	74.5	104	Estonia	71.4	178	Burundi	49.6
25	Finland	79.3	65	Vietnam	74.2	105	Peru	71.4	179	South Africa	49.3
26	Guadeloupe	79.2	66	Malaysia	74.2	106	Egypt	71.3	180	Côte d'Ivoire	48.3
27	Channel Islands	79.0	67	Aruba	74.2	107	Morocco	71.2	181	Malawi	48.3
28	Cyprus	79.0	68	Macedonia	74.2	108	Georgia	71.0	182	Somalia	48.2
29	Ireland	78.9	69	Syria	74.1	109	Iran	71.0	183	Nigeria	46.9
30	Costa Rica	78.8	70	French Polynesia	74.1	110	Indonesia	70.7	184	Democratic	46.5
31	Puerto Rico	78.7	71	Serbia	74.0	111	Thailand	70.6	185	Guinea-Bissau	46.4
32	Luxembourg	78.7	72	Libya	74.0	112	Guatemala	70.3	186	Rwanda	46.2
33	United Arab Emirat	78.7	73	Tunisia	73.9	113	Honduras	70.2	187	Liberia	45.7
34	South Korea	78.6	74	Venezuela	73.7	114	Suriname	70.2	188	Central African	44.7
35	Chile	78.6	75	Saint Lucia	73.7	115	Vanuatu	70.0	189	Afghanistan	43.8
36	Denmark	78.3	76	Bahamas	73.5	116	Trinidad	69.8	190	Zimbabwe	43.5
37	Cuba	78.3	77	Palestinian	73.4	117	Belarus	69.0	191	Sierra Leone	42.6
38	United State	78.3	78	Hungary	73.3	118	Moldova	68.9	192	Lesotho	42.6
39	Portugal	78.1	79	Tonga	73.3	119	Fiji	68.8	193	Zambia	42.4
40	Slovenia	77.9	80	Bulgaria	73.0	120	Grenada	68.7	194	Mozambique	42.1
									195	Swaziland	39.6

ANGKA HARAPAN HIDUP KOTA/ KABUPATEN
Menurut Kabupaten/Kota

	Angka Harapan Hidup		
	L	P	AVG
Sawahlunto	69.33	73.23	71.28
Bukitinggi	69.32	73.22	71.27
Pdg Panjang	68.69	72.62	70.66
Padang	68.48	72.42	70.45
Payakumbuh	68.39	72.34	70.37
Tanah Datar	68.30	72.25	70.28
Solok	67.42	71.38	69.40
SUMATERA BARAT	67.08	71.04	69.06
Agam	66.74	70.71	68.73
Pariaman	66.63	70.60	68.62
Kep. Mentawai	66.35	70.32	68.34
Padang Pariaman	65.99	69.97	67.98
Lima Puluh Kota	65.79	69.76	67.78
Pasaman	64.86	68.78	66.82
Pesisir Selatan	64.85	68.77	66.81
Sijunjung	64.36	68.26	66.31
Solok	64.01	67.89	65.95
Dharmasraya	63.62	67.49	65.56
Pasaman Barat	62.76	66.59	64.68
Solok Selatan	62.50	66.32	64.41

PAKTA INTEGRITAS DAN KINERJA

JANJI TERTULIS WALIKOTA KEPADA MASYARAKAT

Kami pasangan calon pilwako apabila terpilih menjadi Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh periode 2012-2017 berjanji kepada seluruh masyarakat Payakumbuh sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan publik yang diukur dari hasil survei tahunan tentang "Tingkat Kepuasan Publik".
2. Tidak melakukan atau membiarkan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dengan tujuan *menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau kelompok tertentu, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang dapat merugikan keuangan negara.*
3. Mengelola semua penerimaan dan pengeluaran daerah melalui APBD secara transparan yang dipublikasikan setiap triwulan.
4. Menjalankan manajemen strategi dan kinerja secara sungguh-sungguh, konsisten, dan obyektif untuk tatakelola pemerintahan dengan ukuran IKU (Indikator Kinerja Utama) yang jelas, terukur serta dipublikasikan setiap triwulan.
5. Melaksanakan program kerja yang efektif untuk meningkatkan kemandirian daerah yang diukur dari indikator peningkatan daya beli masyarakat, penurunan pengangguran dan kemiskinan, serta peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat.
6. Melaksanakan program andalan kami beserta target sebagai berikut:

NO	Program Andalan	Target (hasil, waktu, dll)
1	<i>Lembudaya petani</i>	
2		
3		
4		
5		

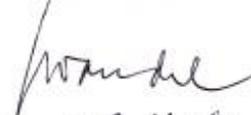
Apabila tidak berhasil memenuhi Janji Tertulis di atas, maka kami siap mundur dari jabatan kami pada tahun berjalan, kecuali dikarenakan faktor di luar kendali kami sebagai kepala daerah.

Payakumbuh, 2-6-..... 2012

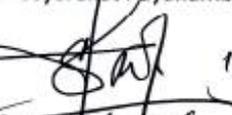
Calon Walikota

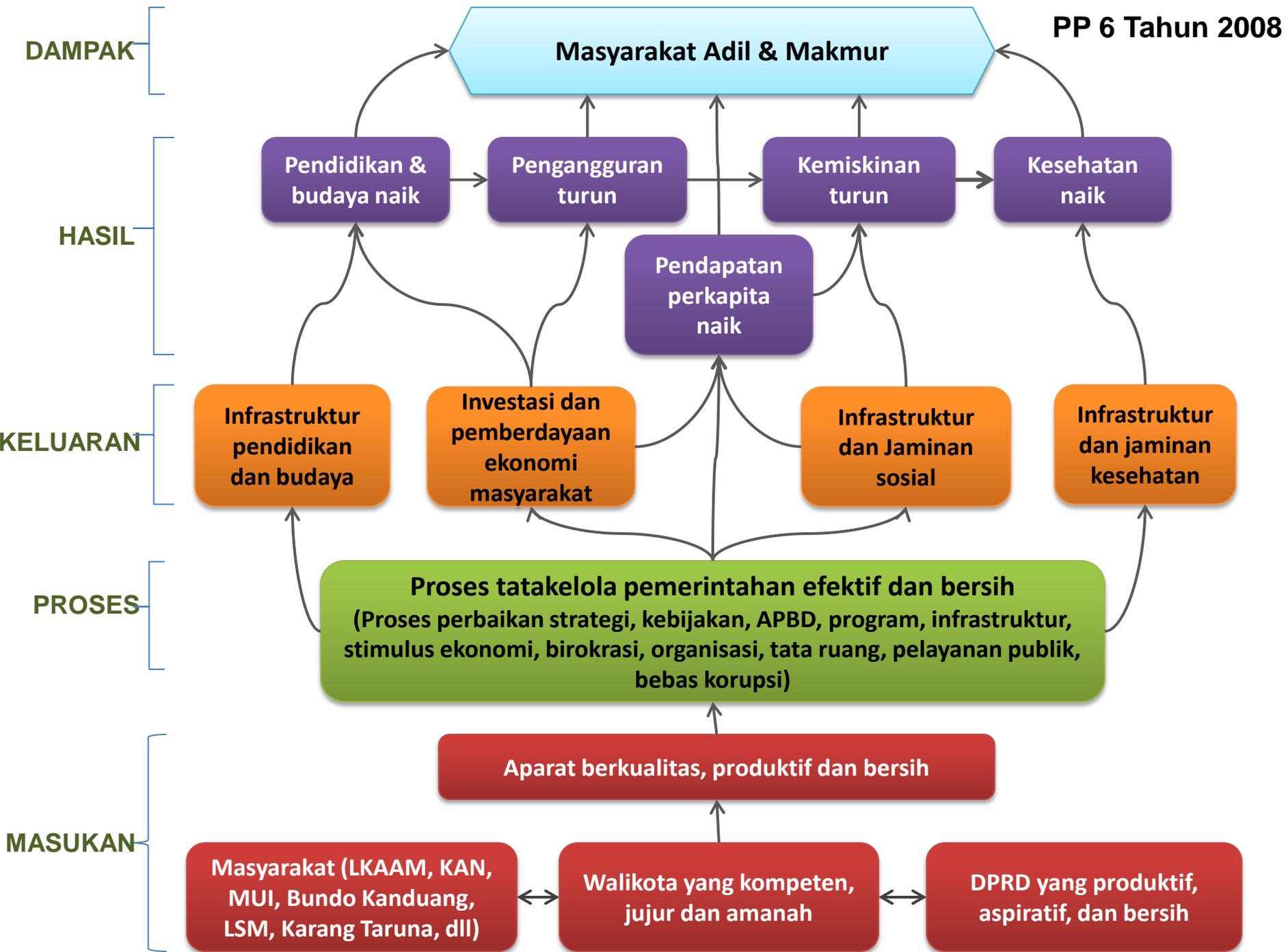

RIZA FALEPI

Calon Wakil Walikota


Supandel Muchtar

Menyaksikan
Aliansi Masyarakat Payakumbuh

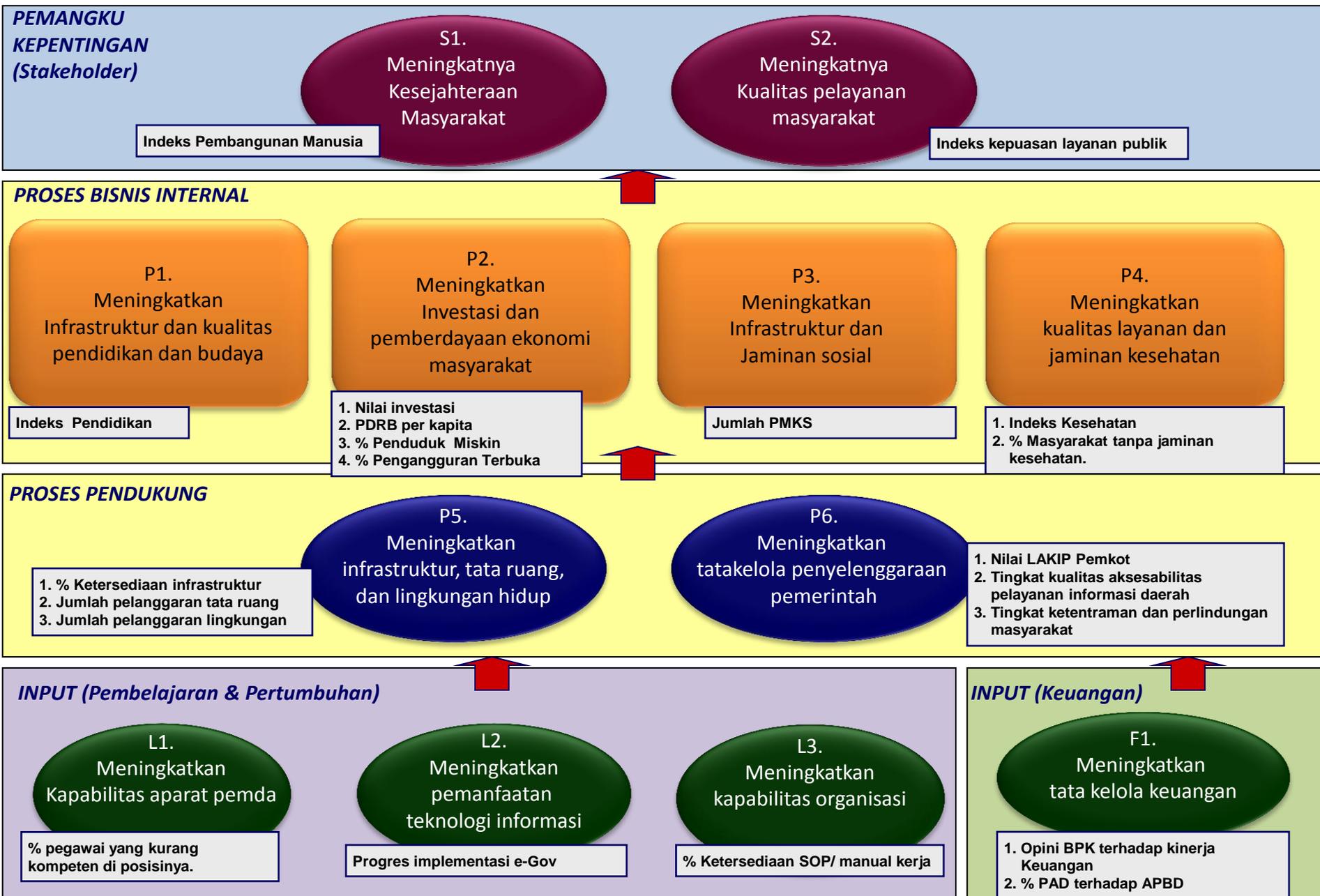

Sevindrajula



Peta Strategi dan IKU Walikota Payakumbuh

Model Balanced Scorecard

Σ KPI = 21
Revisi Okt 2012



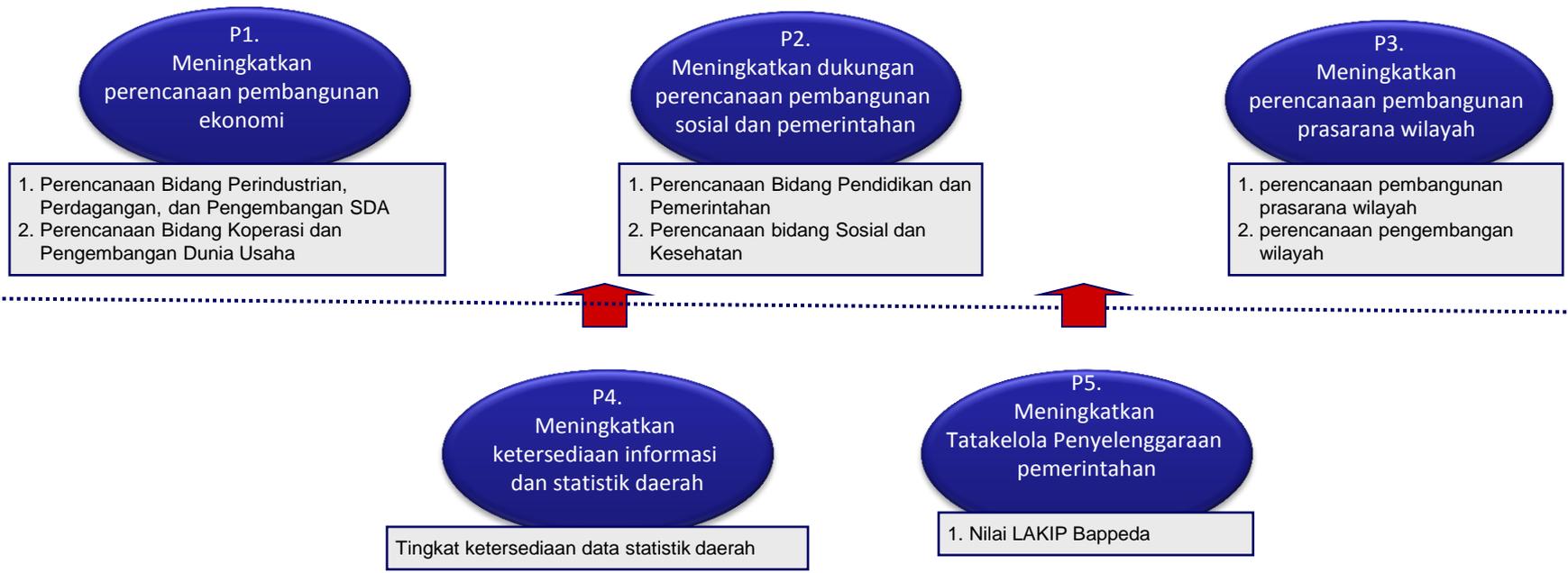
Balanced Scorecard Pemkot Payakumbuh

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH - BAPPEDA

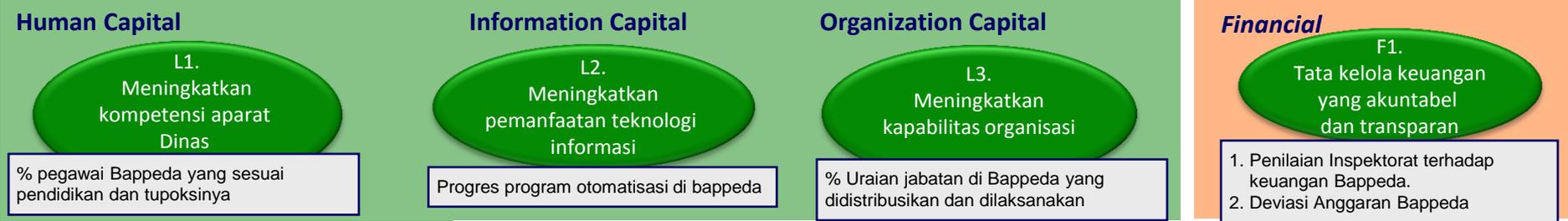
Stakeholder



Internal Business Process



Learning & Growth



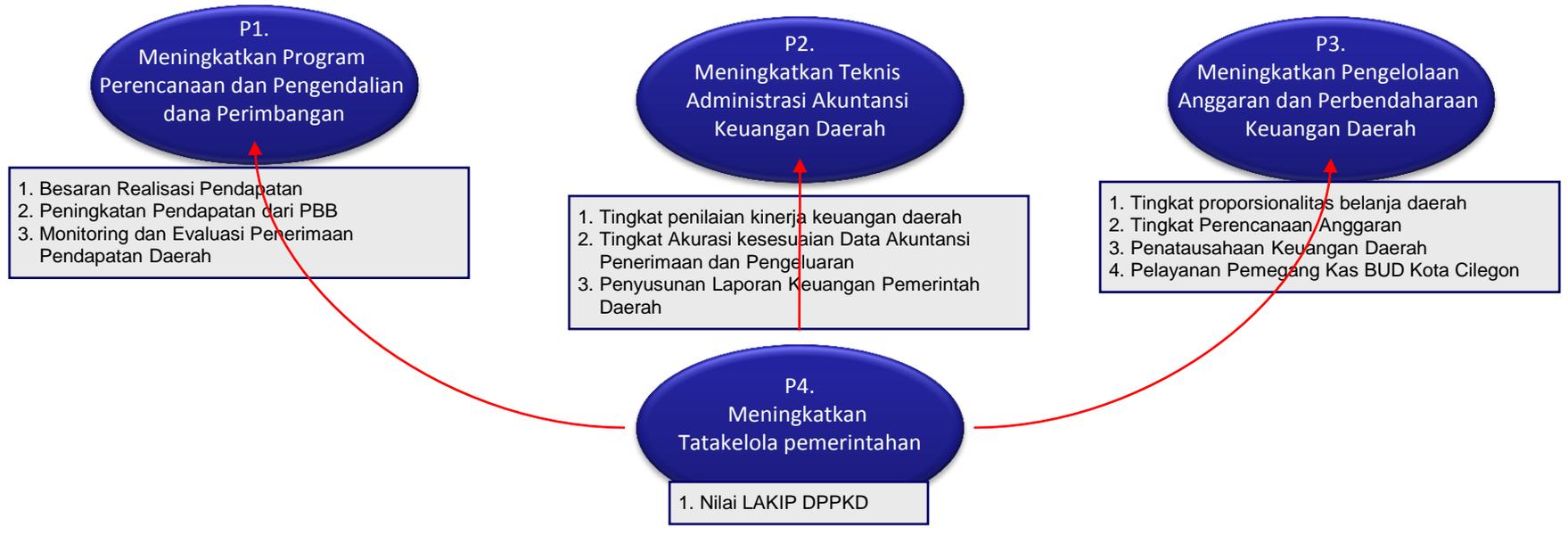
Balanced Scorecard Pemkot Payakumbuh

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah - DPPKD

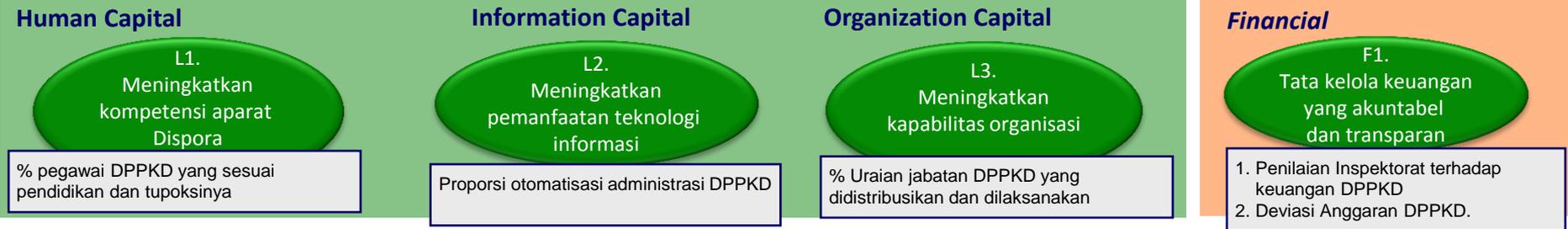
Stakeholder



Internal Business Process



Learning & Growth



Balanced Scorecard Pemkot Payakumbuh

Kantor Penanaman Modal Daerah - KPMD

Stakeholder

S1.
Meningkatkan Pelayanan publik yang prima

IKM KPMD

S2.
Meningkatkan perekonomian daerah (M2)

Nilai investasi

Internal Business Process

P1.
Meningkatkan fasilitasi dan pengendalian investasi

1. Tingkat Pembaharuan (Updating) Data
2. Jumlah Publikasi data Investor Baru
3. Persentase Perusahaan Yang Memberikan Laporan Tepat Waktu

P2.
Meningkatkan Promosi dan Pengembangan Investasi

1. Jumlah pameran Tingkat Nasional Yang Diikuti
2. Jumlah Hari Masa Tayang Promosi Melalui Media Elektronik
3. Jumlah DVD Profil Investasi

P3.
Meningkatkan Tatakelola pemerintahan

1. Nilai LAKIP KPMD

Learning & Growth

Human Capital

L1.
Meningkatkan kompetensi aparat Dispora

% pegawai KPMD yang sesuai pendidikan dan tupoksinya

Information Capital

L2.
Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi

Proporsi otomatisasi administrasi KPMD

Organization Capital

L3.
Meningkatkan kapabilitas organisasi

% Uraian jabatan di KPMD yang didistribusikan dan dilaksanakan

Financial

F1.
Tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan

1. Penilaian Inspektorat terhadap keuangan KPMD
2. Deviasi Anggaran KPMD.

Balanced Scorecard Pemkot Payakumbuh

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Stakeholder

- 1. IKM Dinas Kebudayaan & Pariwisata

S1.
Meningkatkan Pelayanan publik yang prima

S2.
Meningkatkan Pertumbuhan pariwisata

- 1. Pertumbuhan Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara
- 2. Pertumbuhan Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara
- 3. Peningkatan jumlah sanggar seni dan budaya daerah

Internal Business Process

P1.
Meningkatkan perencanaan dan pengembangan seni budaya dan pariwisata

- 1. Jumlah obyek wisata yang tersedia
- 2. Tingkat pengembangan sumberdaya pariwisata
- 3. Jumlah pelaku usaha pariwisata yang terbina

P2.
Meningkatkan pemasaran seni budaya dan pariwisata

- 1. Jumlah konsultasi dan komparansi potensi budaya dan pariwisata
- 2. Jumlah promosi budaya dan pariwisata

P3.
Meningkatkan pengembangan nilai-nilai budaya daerah

- 1. Tingkat jumlah seni yang dibina terhadap total jenis seni
- 2. Jumlah Kesenian yang terbina
- 3. Jumlah komunitas seni yang terbina
- 4. Tingkat pengembangan kesenian
- 5. Tingkat pengembangan sejarah dan nilai tradisional

P4.
Meningkatkan Tatakelola pemerintahan

- 1. Nilai LAKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Learning & Growth

Human Capital

L1.
Meningkatkan kompetensi aparat DKCS

- % pegawai Disbudpar yang sesuai pendidikan dan tupoksinya

Information Capital

L2.
Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi

- Proporsi otomatisasi administrasi Disbudpar

Organization Capital

L3.
Meningkatkan kapabilitas organisasi

- % Uraian jabatan Disbudpar yang didistribusikan dan dilaksanakan

Financial

F1.
Tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan

- 1. Penilaian Inspektorat terhadap keuangan Disbudpar
- 2. Deviasi Anggaran Disbudpar

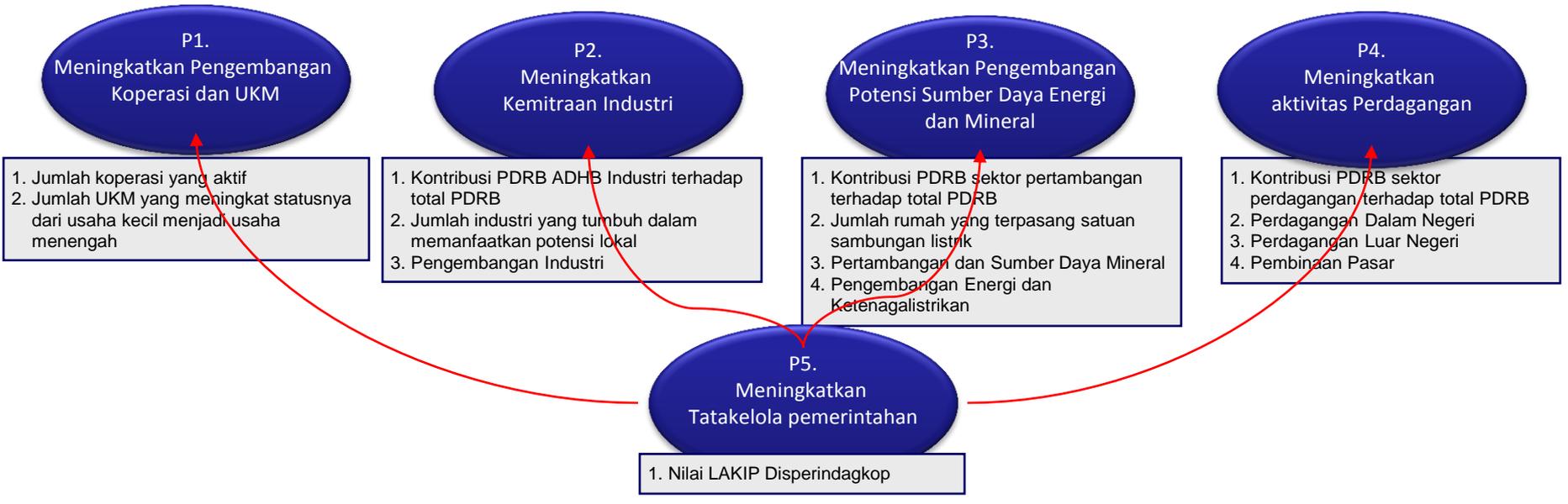
Balanced Scorecard Pemkot Payakumbuh

Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi

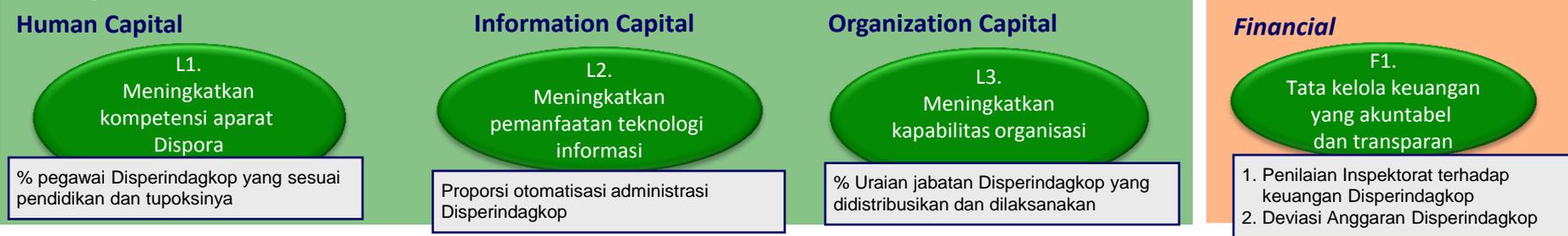
Stakeholder



Internal Business Process



Learning & Growth



Balanced Scorecard Pemkot Payakumbuh

Dinas Tenaga Kerja

Stakeholder

S1.
Meningkatkan Pelayanan publik yang prima

IKM Dinas Tenaga Kerja

S2.
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat (M1)

Tingkat Pengangguran Terbuka

Internal Business Process

P1.
Meningkatkan perlindungan tenaga kerja

1. Proporsi jumlah perusahaan yang menerapkan K3
2. Proporsi jumlah perusahaan yang memiliki sertifikasi K3
3. Meningkatkan Norma Kerja
4. Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja

P2.
Meningkatnya kualitas dan kompetensi tenaga kerja

1. Rasio jumlah tenaga kerja terampil terhadap yang dibina/ difasilitasi
2. Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja
3. Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

P3.
Meningkatkan hubungan kerja antara perusahaan dengan tenaga kerja

1. Jumlah perusahaan yg telah memiliki LKS Bipartit
2. Pembinaan Hubungan Industrial
3. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

P4.
Meningkatkan Tatakelola pemerintahan

1. Nilai LAKIP Dinas Tenaga Kerja

Learning & Growth

Human Capital

L1.
Meningkatkan kompetensi aparat Dispora

% pegawai Dinas Tenaga Kerja yang sesuai pendidikan dan tupoksinya

Information Capital

L2.
Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi

Proporsi otomatisasi administrasi Dinas Tenaga Kerja.

Organization Capital

L3.
Meningkatkan kapabilitas organisasi

% Uraian jabatan Dinas Tenaga Kerja yang didistribusikan dan dilaksanakan

Financial

F1.
Tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan

1. Penilaian Inspektorat terhadap keuangan Dinas Tenaga Kerja.
2. Deviasi Anggaran Dinas Tenaga Kerja

Balanced Scorecard Pemkot Payakumbuh

Dinas Pertanian

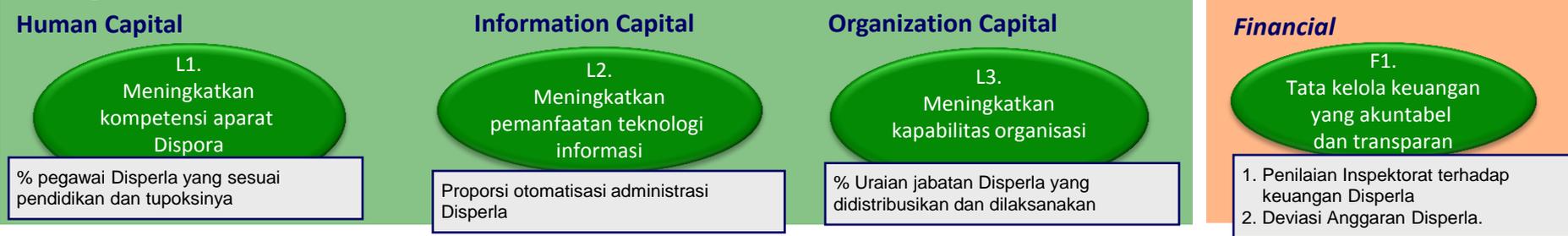
Stakeholder



Internal Business Process



Learning & Growth



Balanced Scorecard Pemkot Payakumbuh

Dinas Tata Kota

Stakeholder

S1.
Meningkatkan Pelayanan publik yang prima

IKM Dinas Tata Kota

S2.
Meningkatkan pengendalian tata ruang (M3)

Prosentase tata ruang yang sesuai peruntukannya

Internal Business Process

P1.
Meningkatkan pengelolaan Tata Ruang

1. Proporsi ketersediaan dokumen perencanaan detail tata ruang
2. Realisasi juklak dan juknis prasarana kota, reklame dan tower
3. Realisasi Pengukuran dan pemetaan
4. Perencanaan tata ruang
5. Tingkat Pemanfaatan dan pengendalian tata ruang

P2.
Meningkatkan Penataan dan Pemeliharaan Prasarana dan Arsitektur Kota

1. Proporsi kelurahan yang telah terlayani oleh prasarana kota
2. Proporsi cakupan kawasan yang sudah direvitalisasi secara arsitektural
3. Tingkat Penataan prasarana dan arsitektur kota
4. Tingkat Pemeliharaan prasarana dan arsitektur kota
5. Tingkat Pengendalian prasarana dan arsitektur kota

P3.
Meningkatkan Pengendalian Bangunan dan Reklame

1. Proporsi jumlah bangunan yang sudah dievaluasi kualitasnya
2. Proporsi jumlah reklame yang sudah dievaluasi kualitasnya
3. Peningkatan Pengendalian dan Penataan Bangunan
4. Peningkatan Pengendalian dan Penataan Reklame
5. Realisasi Dokumentasi dan Pelaporan IMB dan Perijinan Reklame

P4.
Meningkatkan Tatakelola pemerintahan

1. Nilai LAKIP Dinas Tata Kota

Learning & Growth

Human Capital

L1.
Meningkatkan kompetensi aparat Dispora

% pegawai Dinas Tata Kota yang sesuai pendidikan dan tupoksinya

Information Capital

L2.
Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi

Proporsi otomatisasi administrasi Dinas Tata Kota

Organization Capital

L3.
Meningkatkan kapabilitas organisasi

% Uraian jabatan Dinas Tata Kota yang didistribusikan dan dilaksanakan

Financial

F1.
Tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan

1. Penilaian Inspektorat terhadap keuangan Dinas Tata Kota.
2. Deviasi Anggaran Dinas Tata Kota.

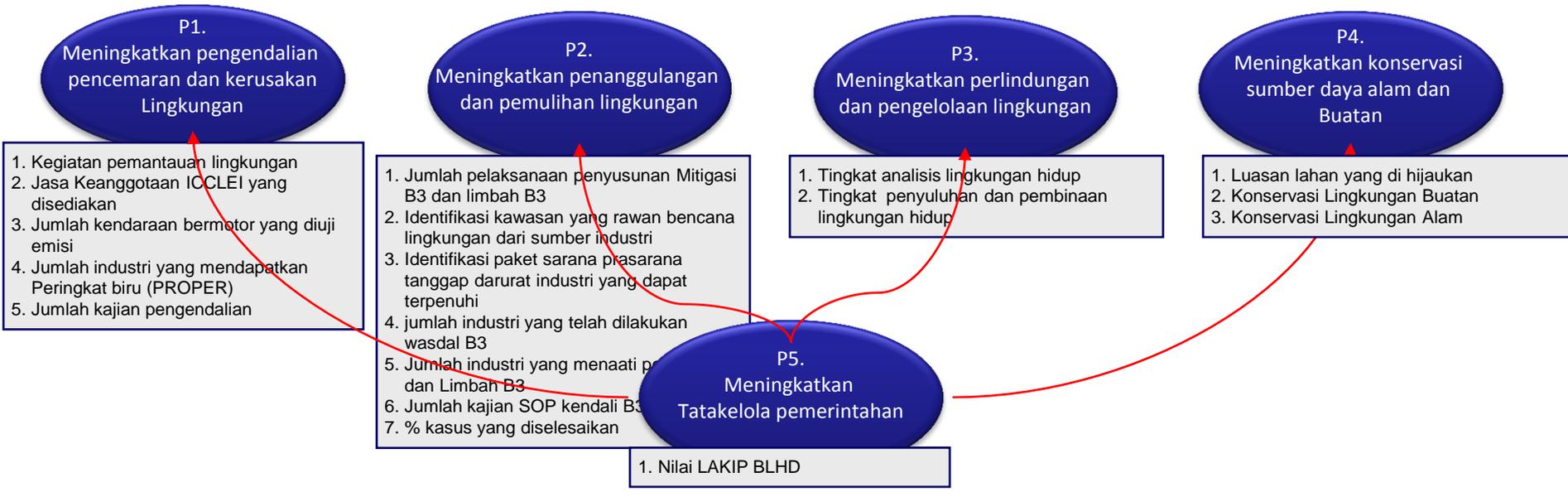
Balanced Scorecard Pemkot Payakumbuh

Badan Lingkungan Hidup Daerah - BLHD

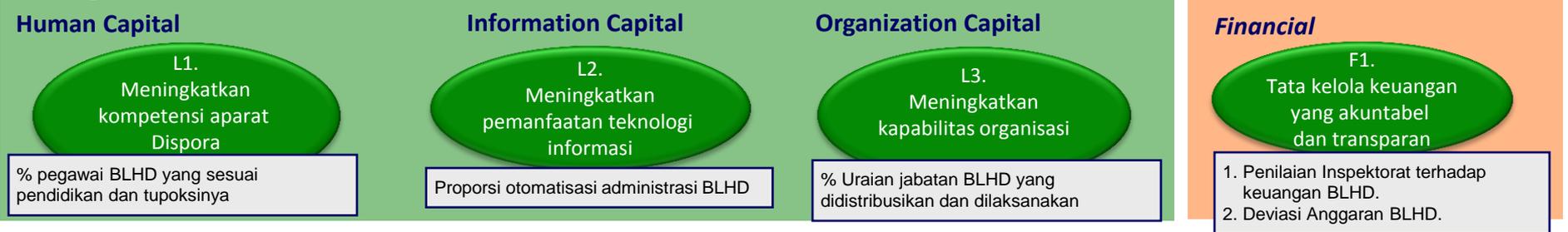
Stakeholder



Internal Business Process



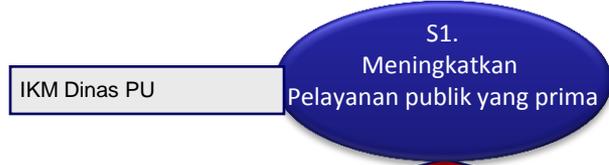
Learning & Growth



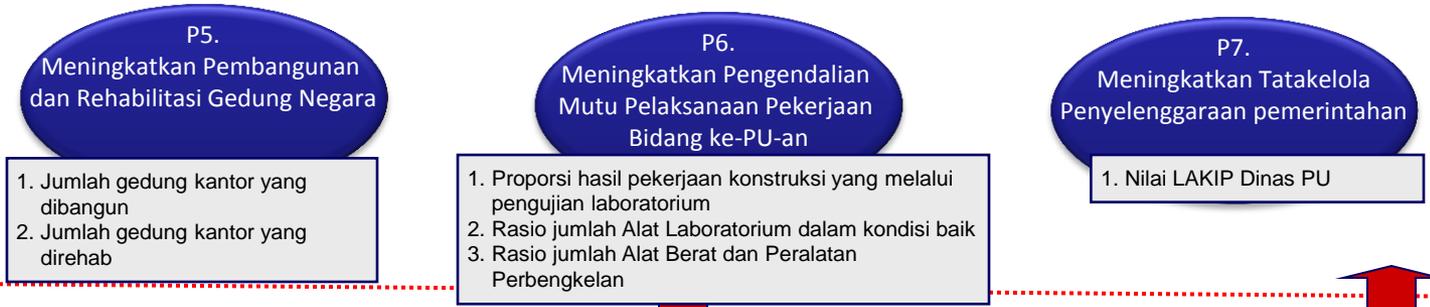
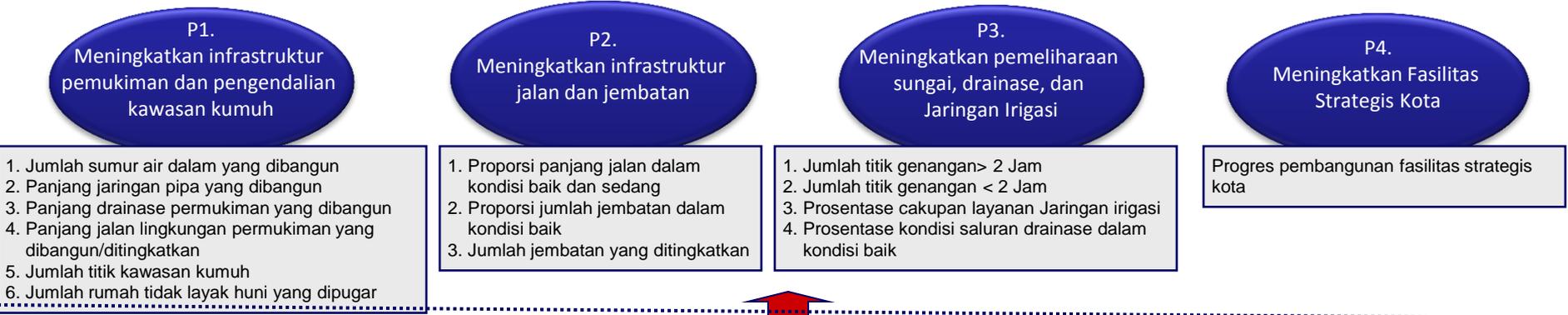
Balanced Scorecard Pemkot Payakumbuh

Dinas Pekerjaan Umum

Stakeholder



Internal Business Process



Learning & Growth



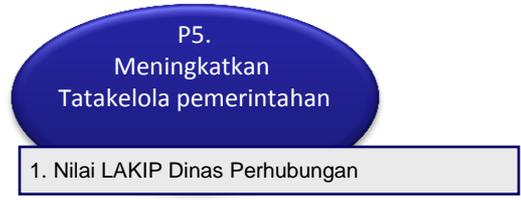
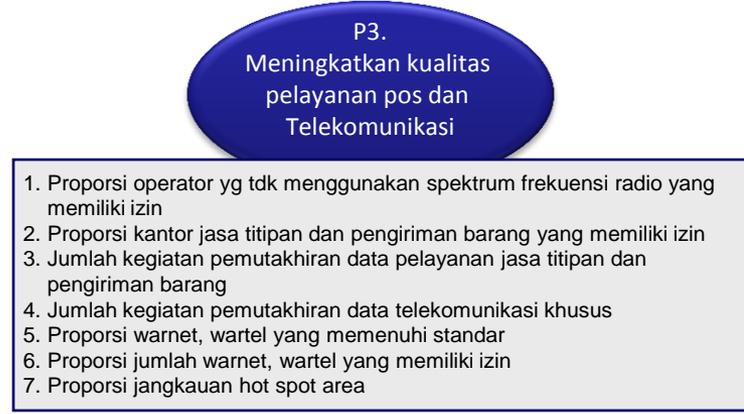
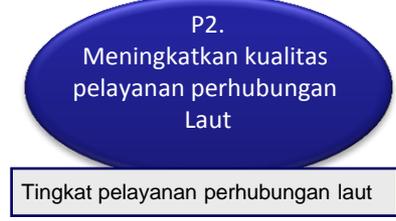
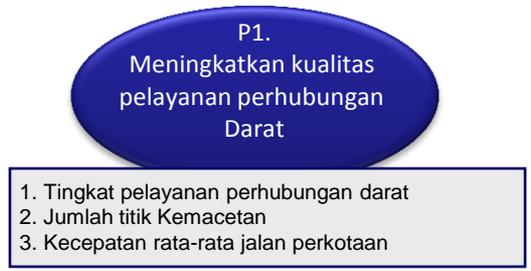
Balanced Scorecard Pemkot Payakumbuh

Dinas Perhubungan

Stakeholder



Internal Business Process



Learning & Growth



Balanced Scorecard Pemkot Payakumbuh

Dinas Pendidikan

Stakeholder



Internal Business Process



Learning & Growth



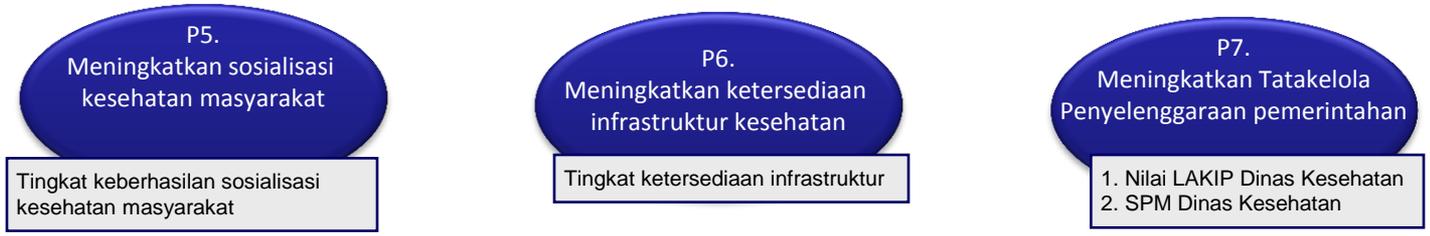
Balanced Scorecard Pemkot Payakumbuh

Dinas Kesehatan

Stakeholder



Internal Business Process



Learning & Growth



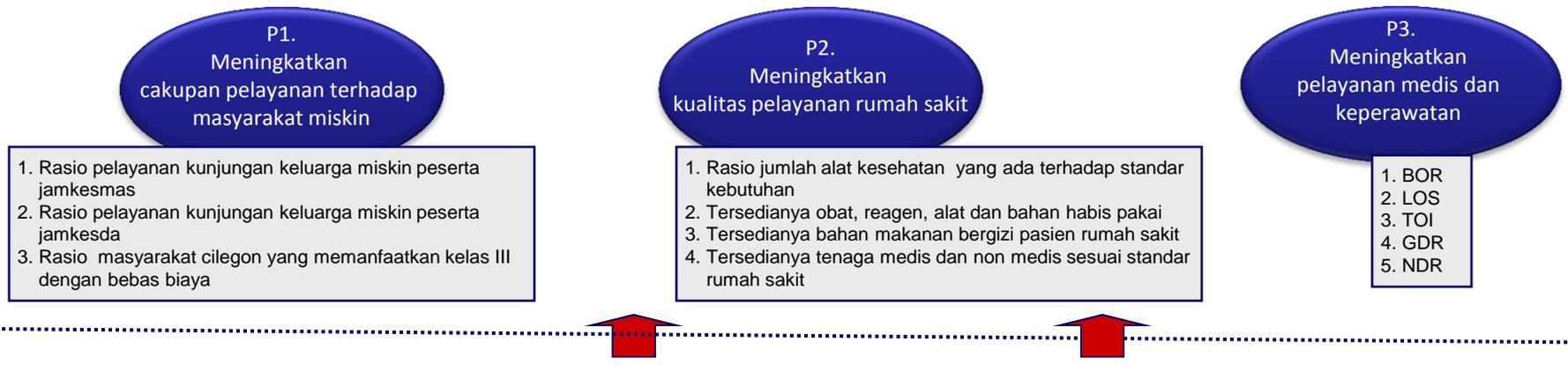
Balanced Scorecard Pemkot Payakumbuh

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH - RSUD

Stakeholder



Internal Business Process



1. Rasio pelayanan kunjungan keluarga miskin peserta jamkesmas
2. Rasio pelayanan kunjungan keluarga miskin peserta jamkesda
3. Rasio masyarakat cilegon yang memanfaatkan kelas III dengan bebas biaya

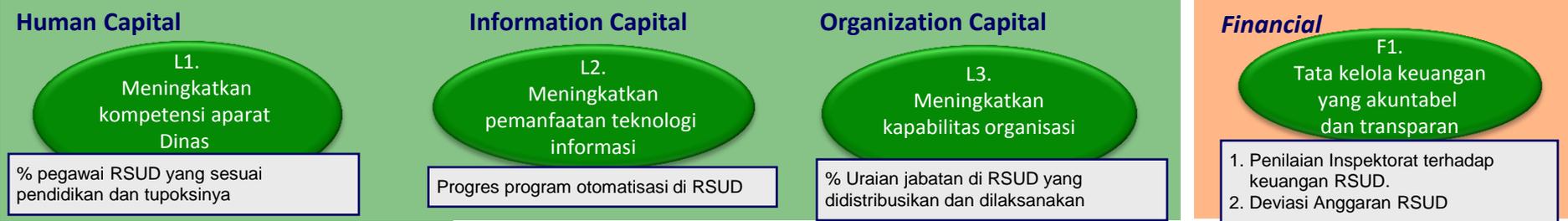
1. Rasio jumlah alat kesehatan yang ada terhadap standar kebutuhan
2. Tersedianya obat, reagen, alat dan bahan habis pakai
3. Tersedianya bahan makanan bergizi pasien rumah sakit
4. Tersedianya tenaga medis dan non medis sesuai standar rumah sakit

1. BOR
2. LOS
3. TOI
4. GDR
5. NDR

Progress Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

1. Nilai LAKIP RSUD
2. SPM RSUD

Learning & Growth



Balanced Scorecard Pemkot Payakumbuh

Revisi Agustus 2011

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan - BKBPP

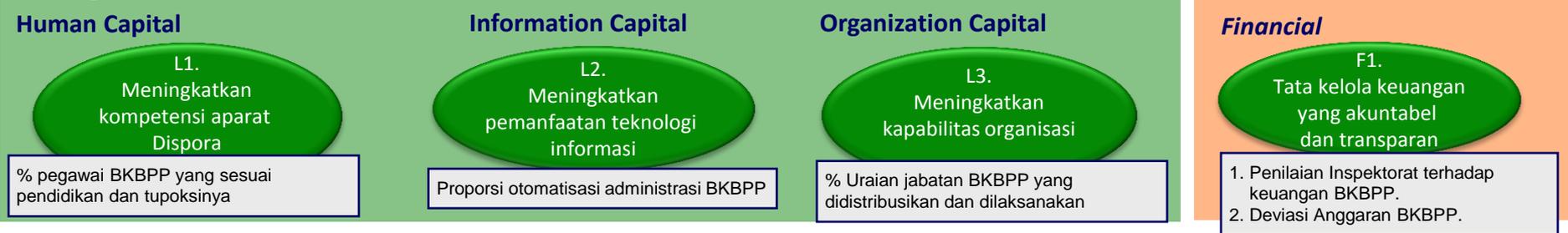
Stakeholder



Internal Business Process



Learning & Growth



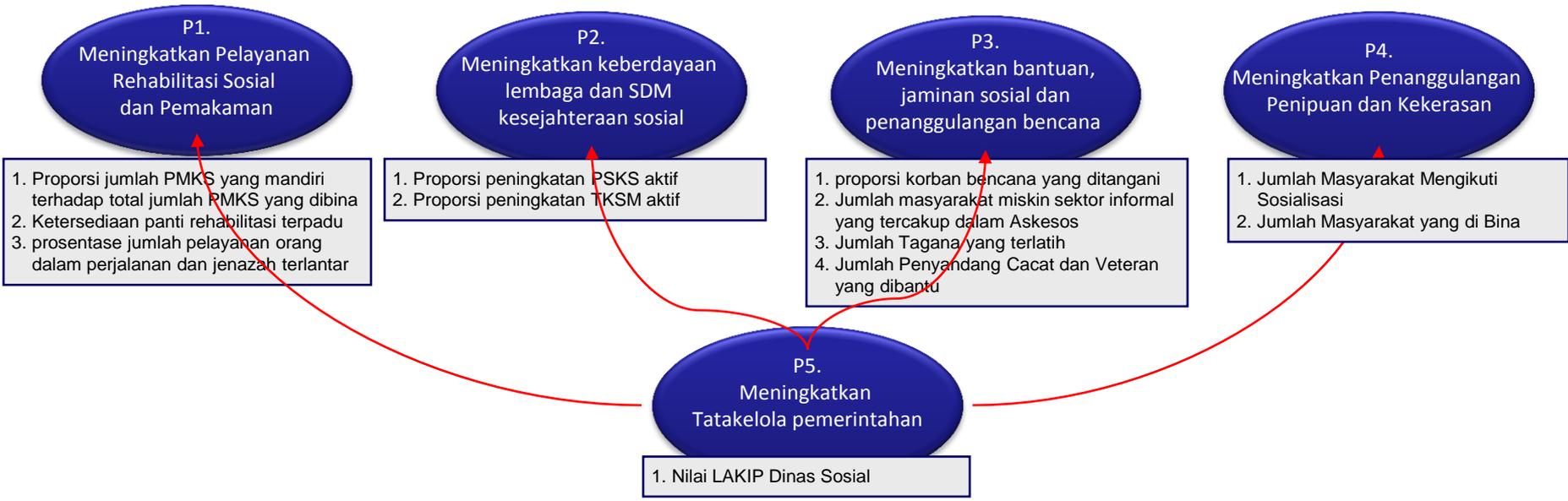
Balanced Scorecard Pemkot Payakumbuh

Dinas Sosial

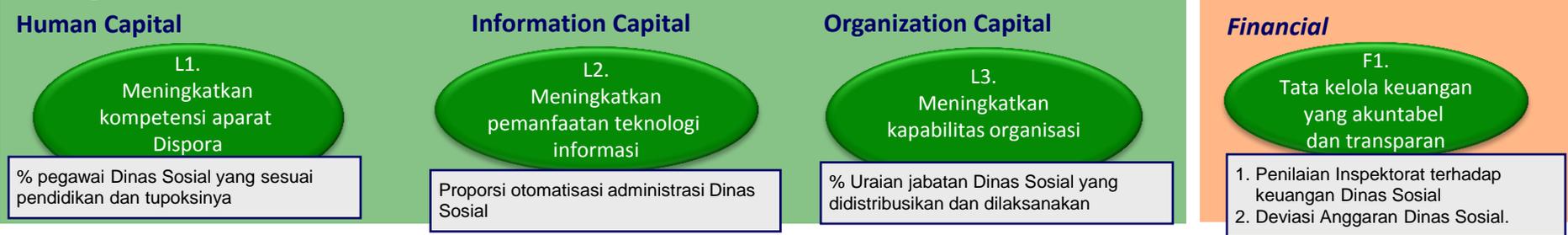
Stakeholder



Internal Business Process



Learning & Growth



Balanced Scorecard Pemkot Payakumbuh

Dinas Pemuda dan Olahraga

Stakeholder

1. IKM Dinas Pemuda dan Olahraga

S1.
Meningkatkan Pelayanan publik yang prima

S2.
Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Olahraga dan Pembangunan

1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam berolahraga
2. Tingkat partisipasi pemuda dalam pembangunan

Internal Business Process

P1.
Meningkatkan sarana dan prasarana olah raga

1. Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana olahraga
2. Rasio terpeliharanya sarana prasarana olahraga yang ada
3. Tingkat ketersediaan alat olahraga dan seragam
4. Progres pembangunan Sport Center

P2.
Meningkatkan pembinaan dan pengembangan olahraga

1. Jumlah atlet berprestasi di tingkat provinsi
2. Jumlah atlet berprestasi di tingkat Nasional
3. Tingkat ketersediaan pelatih
4. Tingkat ketersediaan wasit
5. Tingkat pembinaan prestasi atlit
6. Tingkat mutu tenaga pembina

P3.
Meningkatkan pembinaan dan pengembangan pemuda

1. Tingkat kegiatan kepemudaan
2. Tingkat pengembangan organisasi kepemudaan
3. Tingkat pembinaan pemuda

P4.
Meningkatkan Tatakelola pemerintahan

1. Nilai LAKIP Dinas Pemuda dan Olahraga

Learning & Growth

Human Capital

L1.
Meningkatkan kompetensi aparat Dispora

% pegawai Dispora yang sesuai pendidikan dan tupoksinya

Information Capital

L2.
Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi

Proporsi otomatisasi administrasi Dispora

Organization Capital

L3.
Meningkatkan kapabilitas organisasi

% Uraian jabatan Dispora yang didistribusikan dan dilaksanakan

Financial

F1.
Tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan

1. Penilaian Inspektorat terhadap keuangan Dispora
2. Deviasi Anggaran Dispora.

Balanced Scorecard Pemkot Payakumbuh

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Revisi Agustus 2011

Stakeholder

IKM Badan Kesbang Linmas

S1. Meningkatkan Pelayanan publik yang prima

S2. Meningkatkan kualitas pembinaan SDM masyarakat

1. Jumlah kasus konflik SARA
2. Tingkat penyelesaian kasus SARA yang difasilitasi oleh pemda

Internal Business Process

P1. Meningkatkan Pembinaan Kelembagaan Politik dan Kemasyarakatan

- Persentase LSM dan Ormas yang memahami etika berdemokrasi

P2. Meningkatkan kapasitas Kominda (Komunitas Intelijen Daerah)

- Jumlah kegiatan Kominda

P3. Meningkatkan kegiatan penyuluhan dan pencegahan konflik

1. Jumlah koordinasi antar unsur Muspida
2. Jumlah Ormas dan LSM yang terdata
3. Jumlah peserta yang memahami penyalahgunaan narkoba

P4. Meningkatkan Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana

1. Tingkat Pembinaan anggota satuan Linmas
2. Prosentase Jumlah Peserta yang memahami masalah kebencanaan

P5. Meningkatkan Wawasan Kebangsaan

1. Jumlah peserta sosialisasi yang memahami nilai-nilai ideologi bangsa
2. Jumlah peserta Sosialisasi forum pembauran kebangsaan (FPK)
3. Jumlah peserta Talkshow peningkatan wawasan kebangsaan
4. Jumlah Peserta Pembinaan Peningkatan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama

P6. Meningkatkan Tatakelola Penyelenggaraan pemerintahan

1. Nilai LAKIP Badan Kesbang Linmas.

Learning & Growth

Human Capital

L1. Meningkatkan kompetensi aparat Dinas

- % pegawai Badan Kesbang Linmas. yang sesuai pendidikan dan tupoksinya

Information Capital

L2. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi

- Proporsi otomatisasi administrasi Badan Kesbang Linmas.

Organization Capital

L3. Meningkatkan kapabilitas organisasi

- % Uraian jabatan Badan Kesbang Linmas yang didistribusikan dan dilaksanakan

Financial

F1. Tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan

1. Penilaian Inspektorat terhadap keuangan Badan Kesbang Linmas.
2. Deviasi Anggaran Badan Kesbang Linmas.

Balanced Scorecard Pemkot Payakumbuh

Revisi Agustus 2011

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Stakeholder

IKM DKCS

S1.
Meningkatkan
Pelayanan publik yang prima

Internal Business Process

P1.
Meningkatkan
Pelayanan Pendaftaran
Penduduk

1. Rasio kepemilikan KTP berbasis NIK Nasional terhadap jumlah penduduk berKTP
2. Rasio kehadiran peserta penyuluhan thd jumlah SDM Adm Kepddk di Kel. dan Kec.
3. Rasio kesalahan petugas register terhadap buku yang teregister
4. Kelengkapan buku dan formulir panduan administrasi kependudukan yang tersedia

P2.
Meningkatkan pembinaan
dan pengawasan kepemilikan
dokumen

1. Tingkat pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kepemilikan dokumen
2. Tingkat Ketersediaan pendaftaran penduduk

P3.
Meningkatkan Pelayanan
Pencatatan Kelahiran
dan Kematian

1. Jumlah peserta Bintek tata cara dan persyaratan pencatatan kelahiran dan kematian
2. Tingkat cakupan pelayanan di 43 Kelurahan
3. Ketersediaan dokumentasi register akta dan berkas pendukung
4. Kegiatan verifikasi data kepemilikan akta-akta catatan sipil

P4.
Meningkatkan pelayanan pencatatan
perubahan, pengakuan, pengesahan,
pengangkatan anak, perkawinan
dan perceraian

1. Jumlah realisasi peserta yang mengikuti Bintek/ sosialisasi
2. Jumlah Pencatatan Perkawinan
3. Ketersediaan dokumentasi Register akta dan berkas pendukung

P5.
Meningkatkan ketersediaan
Informasi Kependudukan

1. Tingkat tersediannya informasi administrasi kependudukan
2. Tingkat Tersebarannya informasi data kependudukan
3. Tingkat ketersediannya informasi data catatan sipil
4. Tingkat Ketersediaan buku profil kependudukan

P6.
Meningkatkan
Tatakelola pemerintahan

1. Nilai LAKIP DKCS

Learning & Growth

Human Capital

L1.
Meningkatkan
kompetensi aparat DKCS

- % pegawai DKCS yang sesuai pendidikan dan tupoksinya

Information Capital

L2.
Meningkatkan
pemanfaatan teknologi
informasi

- Proporsi otomatisasi administrasi DKCS

Organization Capital

L3.
Meningkatkan
kapabilitas organisasi

- % Uraian jabatan DKCS yang didistribusikan dan dilaksanakan

Financial

F1.
Tata kelola keuangan
yang akuntabel
dan transparan

1. Penilaian Inspektorat terhadap keuangan DKCS
2. Deviasi Anggaran DKCS

Balanced Scorecard Pemkot Payakumbuh

Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Stakeholder

1. IKM Dinas Kebersihan dan Pertamanan

S1. Meningkatkan Pelayanan publik yang prima

S2. Meningkatkan Lingkungan bersih dan asri

1. Proporsi cakupan pelayanan persampahan
2. Persentase luas RTH terhadap luas wilayah

Internal Business Process

P1. Meningkatkan Pengelolaan persampahan

1. Persentase cakupan penanganan sampah
2. Tingkat Pelayanan Kebersihan
3. Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kebersihan

P2. Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan kebersihan

1. Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk
2. Tingkat Penyuluhan Kebersihan
3. Tingkat Pengendalian Kebersihan

P3. Meningkatkan Keindahan kota

1. Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB
2. Tingkat Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
3. Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Taman

P4. Meningkatkan Tatakelola pemerintahan

1. Nilai LAKIP Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Learning & Growth

Human Capital

L1. Meningkatkan kompetensi aparat DKCS

% pegawai DKP yang sesuai pendidikan dan tupoksinya.

Information Capital

L2. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi

Proporsi otomatisasi administrasi DKP

Organization Capital

L3. Meningkatkan kapabilitas organisasi

% Uraian jabatan DKP yang didistribusikan dan dilaksanakan.

Financial

F1. Tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan

1. Penilaian Inspektorat terhadap keuangan DKP
2. Deviasi Anggaran DKP

Balanced Scorecard Pemkot Payakumbuh

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KETAHANAN PANGAN - BPMKP

Stakeholder



Internal Business Process



Learning & Growth



Balanced Scorecard Pemkot Payakumbuh

KANTOR PEMADAM KEBAKARAN

Stakeholder

S1. Meningkatkan Pelayanan publik yang prima

- 1. IKM Kantor Pemadam Kebakaran
- 2. Persentase jumlah kasus bencana yang dapat ditangani

Internal Business Process

P1. Meningkatkan pelayanan kantor pemadam Kebakaran

- 1. Cakupan pelayanan penanggulangan Kebakaran
- 2. Jumlah anggota SATLAKAR
- 3. Data dan laporan kebakaran yang lengkap dan tepat waktu
- 4. Data jumlah bangunan gedung dan perumahan yang sesuai dengan klasifikasinya

P2. Meningkatkan kesiagaan masyarakat

- 1. Jumlah bangunan pertokoan yang memiliki sarana proteksi kebakaran
- 2. Jumlah perusahaan memiliki SOP kebakaran dan tim tanggap darurat
- 3. Jumlah sosialisasi cara pencegahan dan penanggulangan kebakaran
- 4. Jumlah instansi yang disosialisasikan tentang Standar dan Prosedur Pencegahan Kebakaran
- 5. Jumlah industri yang mengikuti seminar sistem tanggap darurat

P3. Meningkatkan kesiagaan personil kantor pemadam kebakaran

- 1. Personil yang siaga dan personil yang masuk dalam formasi Jarko
- 2. Kesiagaan pada hari raya dan hari besar Nasional

P4. Meningkatkan penanggulangan kebakaran

- 1. Jumlah Instansi dan Industri yang mengikuti drill penanggulangan kebakaran
- 2. Kegiatan latihan petugas damkar

P5. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Kebakaran

Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana

P6. Meningkatkan Tatalaksana Penyelenggaraan Pemerintahan

- 1. Nilai LAKIP Kantor Damkar

Learning & Growth

Human Capital

L1. Meningkatkan kompetensi aparat Dinas

% pegawai Damkar yang sesuai pendidikan dan tupoksinya

Information Capital

L2. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi

Proporsi otomatisasi administrasi Kantor Damkar

Organization Capital

L3. Meningkatkan kapabilitas organisasi

% Uraian jabatan di Kantor Damkar yang didistribusikan dan dilaksanakan

Financial

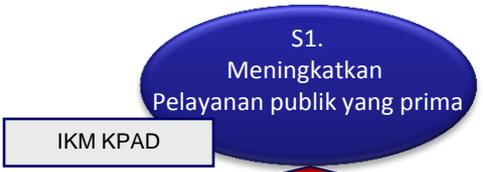
F1. Tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan

- 1. Penilaian Inspektorat terhadap keuangan Kantor Damkar.
- 2. Deviasi Anggaran Kantor Damkar

Balanced Scorecard Pemkot Payakumbuh

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah - KPAD

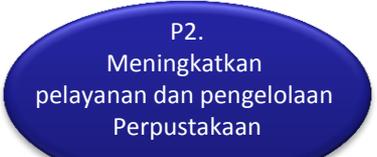
Stakeholder



Internal Business Process



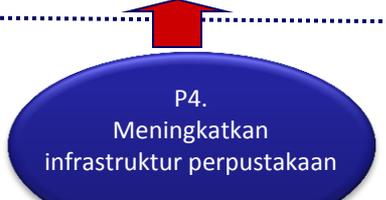
1. Jumlah kunjungan ke perpustakaan
2. Pelaksanaan pameran hari jadi kota cilegon
3. Pelaksanaan gerakan nasional gemar membaca dan hari kunjung perpustakaan
4. Ketersediaan mobil dan motor perpustakaan keliling
5. Ketersediaan Buku Taman Bacaan



1. Rasio koleksi buku yang ada di KPAD dengan perpustakaan umum
2. Tingkat Terlaksananya stok opname buku
3. Rasio Jumlah Pengunjung Perpustakaan yang terlayani
4. Ketersediaan sarana pelayanan
5. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pelayanan Perpustakaan
6. Jumlah peserta pelatihan pengelolaan bahan pustaka secara baku



1. Kualitas Pengelolaan Arsip Daerah
2. Jumlah peserta pelatihan pengelolaan arsip secara baku



1. Ketersediaan Ruang Perpustakaan dan perlengkapan
2. Ketersediaan Ruang Perpustakaan mesjid



1. Nilai LAKIP KPAD

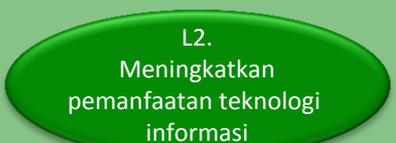
Learning & Growth

Human Capital



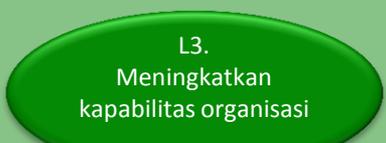
- % pegawai KPAD yang sesuai pendidikan dan tupoksinya

Information Capital



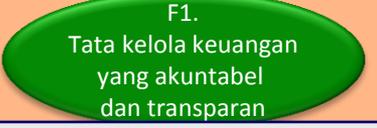
- Proporsi otomatisasi administrasi KPAD

Organization Capital



- % Uraian jabatan di KPAD yang didistribusikan dan dilaksanakan

Financial



1. Penilaian Inspektorat terhadap keuangan KPAD.
2. Deviasi Anggaran KPAD.

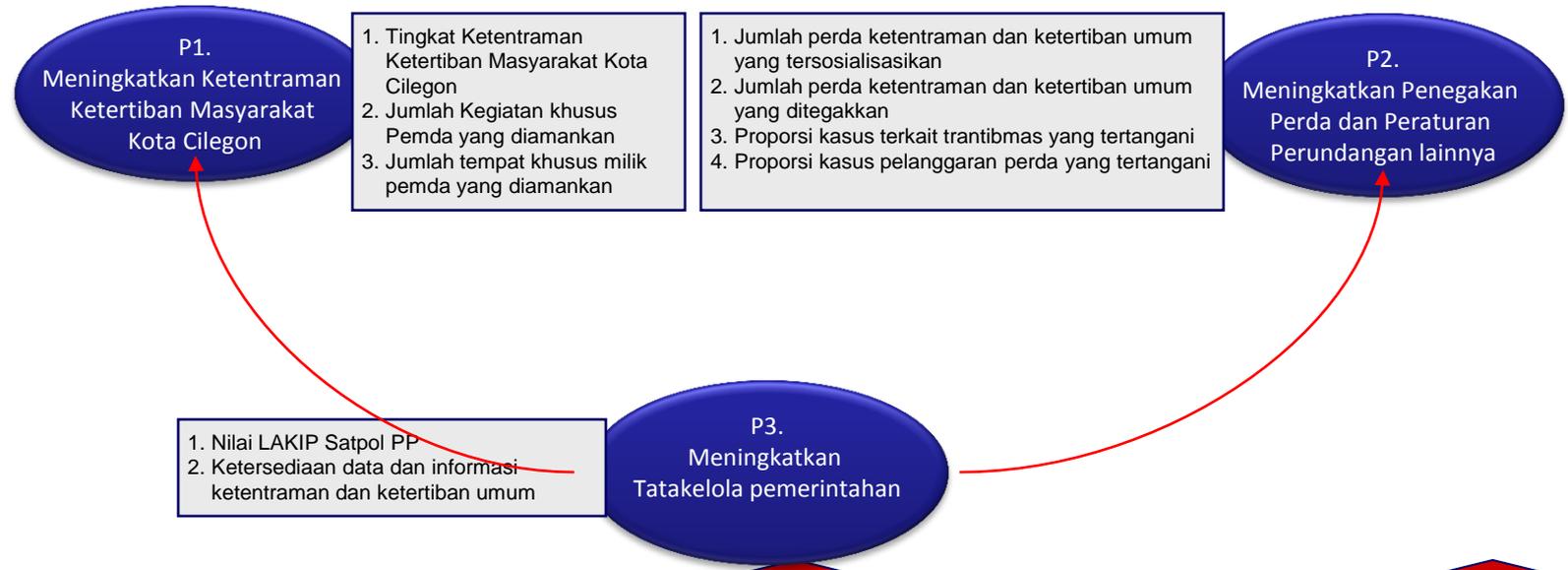
Balanced Scorecard Pemkot Payakumbuh

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja – Satpol PP

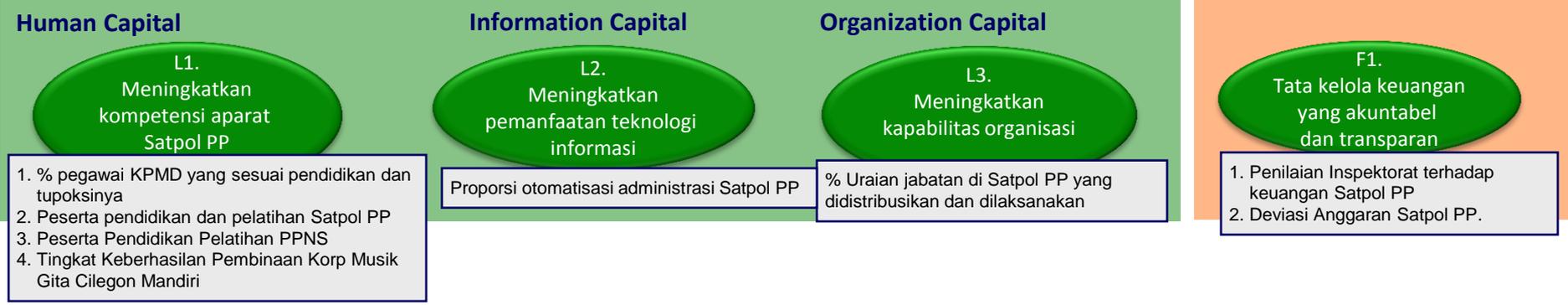
Stakeholder



Internal Business Process



Learning & Growth



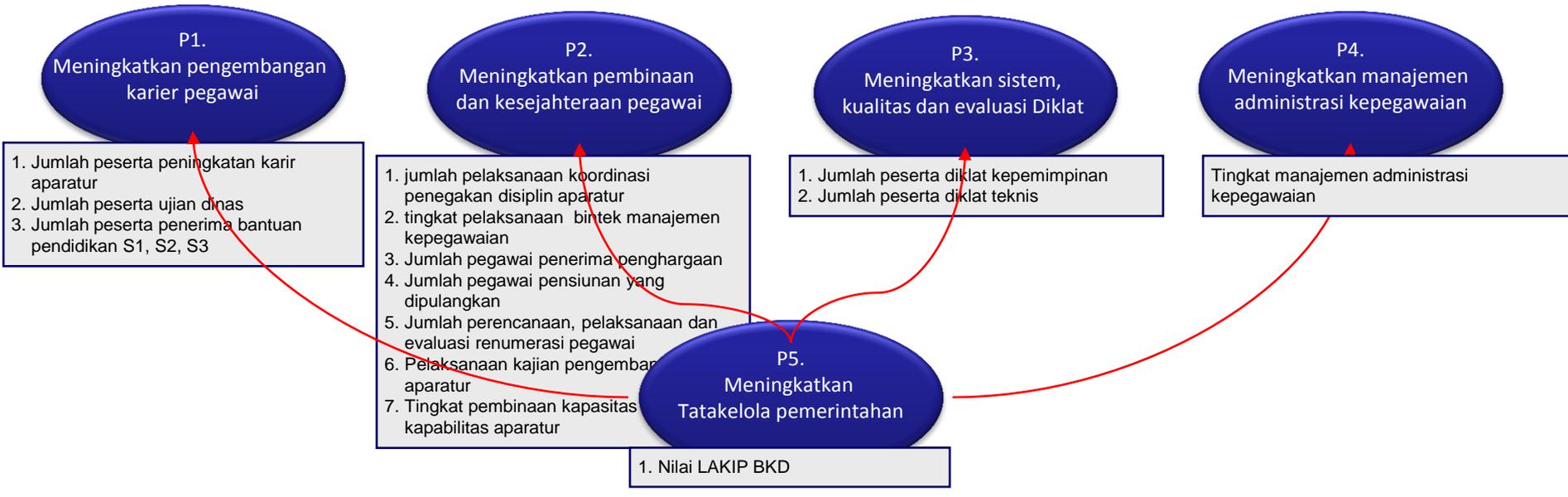
Balanced Scorecard Pemkot Payakumbuh

Badan Kepegawaian dan Diklat - BKD

Stakeholder



Internal Business Process



Learning & Growth



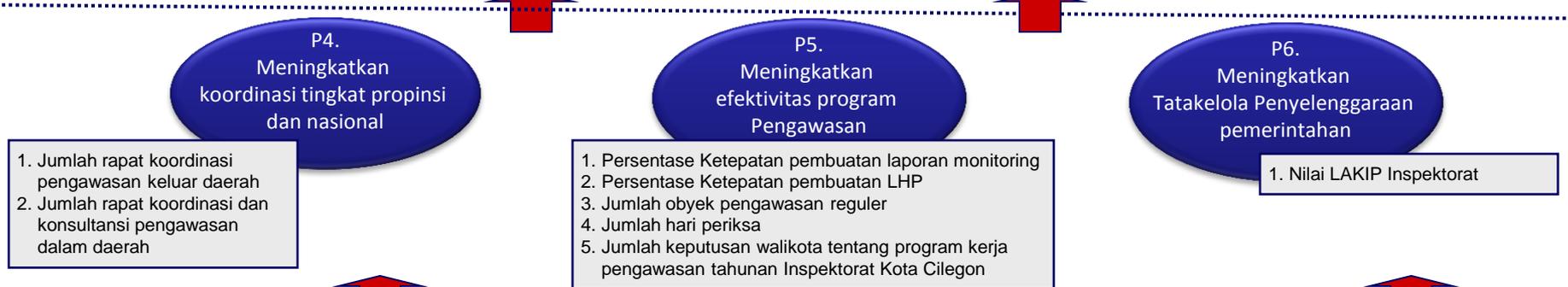
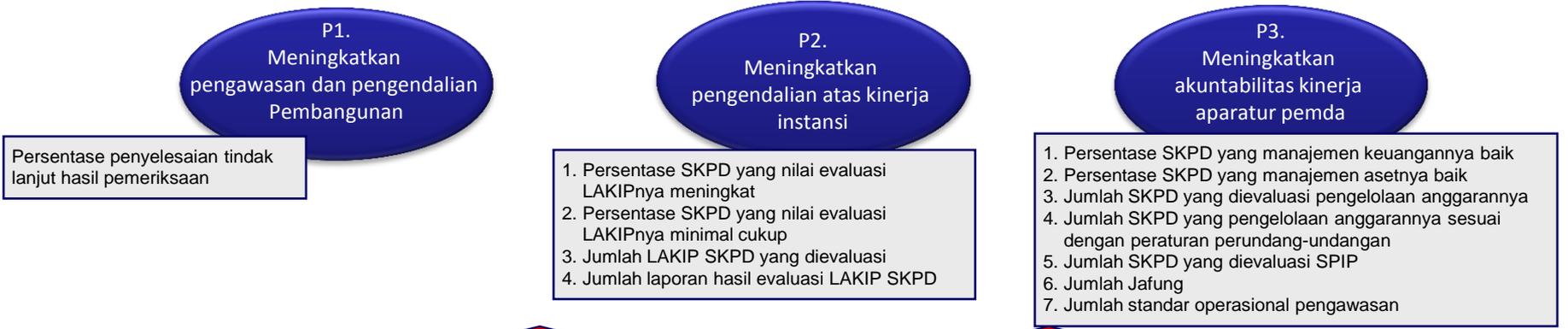
Balanced Scorecard Pemkot Payakumbuh

INSPEKTORAT

Stakeholder



Internal Business Process



Learning & Growth



“Jika anda menunda segala sesuatu sampai anda yakin tentangnya, maka anda tidak akan mengerjakan apa-apa.”

Norman Vincent Peale

“Seseorang yang tidak pernah melakukan kesalahan berarti belum pernah melakukan sesuatu yang baru.”

Albert Einstein

THANK YOU